



**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA Telp (0274) 586563

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

YOGYAKARTA, 2021



**HUBUNGAN INDUSTRIAL
KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
YOGYAKARTA**



PIMPINAN



DR. FRIDA ARIYANI, S.H., M.HUM
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA



DR. FAHMIRON, S.H., M.HUM
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA



ZULFAHMI ANWAR, S.H., M.HUM
PANITERA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA



WIDODO BUDI SANTOSO, SH
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA Tahun 2020.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA ini adalah penyampaian hasil pertanggung jawaban mengenai program kegiatan dan pelaksanaan kinerja selama Tahun Anggaran 2020.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun berdasarkan surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), Surat dari Plt.Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1930A/SEK/OT.01.2/I1/2020 Tanggal 27 November 2020.

Pelaksanaan kegiatan dan program kerja serta inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 akan kami laporkan pada masing-masing bagian. Mulai dari Kebijakan Umum Peradilan, Visi dan Misi serta Rencana Strategis (Renstra), Keadaan Penyelesaian Perkara, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengawasan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini. Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun ini disadari jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan baik menyangkut materi maupun penyajiannya, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran-saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan kinerja dan laporan yang akan datang. Semoga dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini akan menjadi pedoman untuk perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA.

Pengadilan Negeri Yogyakarta,
Ketua

Dr. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum
NIP. 196802031992122001

DAFTAR ISI

PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
Bab I Pendahuluan.....	6
Bab II Keadaan dan Penyelesaian Perkara	21
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta	21
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	21
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	22
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	23
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	24
B. Penyelesaian Perkara	26
- Jumlah sisa perkara yang diputus	26
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	27
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	28
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	30
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	31
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	33
- Posbakum.....	33
- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara).....	33
- Sidang Keliling.....	33
Bab III Sumber Daya Manusia	34
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan / golongan / pendidikan	
1. Mutasi.....	40
2. Promosi.....	40
3. Pensiun.....	42
4. Diklat (SDM Teknis/non Teknis yang telah mengikuti Diklat... ..	44
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi... ..	48
A. Pengelolaan Keuangan	48
- Pengelolaan Keuangan DIPA.....	48
- Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	54

	- Pengelolaan Keuangan Perkara.....	56
B.	Pengelolaan Saran Prasarana	61
C.	Pengelolaan Teknologi Informasi	70
	- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Negeri Yogyakarta	70
	- Implementasi e-court di Lingkungan Peradilan Negeri Yogyakarta.....	71
Bab V.	Peningkatan Pelayanan Publik	
	- Akreditasi Penjaminan Mutu	81
	- Reformasi Birokrasi.....	82
	- Zona Integritas.....	83
	- Pilot Project Ramah Disabilitas.....	83
	- Evaluasi Pelayanan Publik.....	83
	- Posbakum.....	88
	- Inovasi Pelayanan Publik.....	89
	- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	89
	- Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).....	93
BAB VI	Pengawasan.....	119
	A. Internal.....	119
	B. Evaluasi	115
BAB VII	Penutup.....	121
	A. Kesimpulan	121
	B. Saran.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA adalah instansi vertikal dari Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan adanya usaha dan kerja keras untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA mempunyai program prioritas yang harus dilaksanakan, antara lain :

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Dengan adanya SK KMA I-I/144/2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi

Yogyakarta kelas IA juga telah membuat website Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dengan alamat : www.pn.yogyakarta.go.id.

Program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan telah dapat memberikan kemudahan mendapatkan informasi kepada masyarakat pencari keadilan, baik pada website maupun administrasi di pengadilan.

Untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah mengimplementasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana telah diimplementasikan aplikasi PTSP dari Dirjen Badilum, E-SKum dan KIOS-K untuk informasi perkara dan antrian sidang, jadwal sidang, antrian PTSP, aplikasi IKM dan media informasi lainnya.

Sedangkan untuk ruang sidang Pengadilan Negeri dan Tipikor telah dipasang ATR dan alat perekam audio visual untuk membatu proses persidangan.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

Program pengembangan system peradilan yang akuntabel dan transparan tercermin dengan Pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan RENSTRA, Penetapan Kinerja, IKU, Pemantauan Pencapaian kinerja, LKJIP, Penyusunan SAKIP. Pengelolaan Akuntabilitas kinerja tercermin:

1. Upaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani Akuntabilitas Kinerja;
2. Tersusunnya Pedoman Akuntabilitas Kinerja ;
3. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala;

Pelaporan melalui SIPP, Direktori Putusan, SIKEP MARI, SIMARI, Komdanas, e-LLK, Aplikasi SAS,SILABI, Monitor Jadwal Sidang dan lain-lain.

3. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI

Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut. Rencana strategis telah direview dan berakhir di tahun 2020 ini.

4. Modernisasi layanan peradilan berbasis teknologi informasi dan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam sistem peradilan modern, penegakan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka harus merespons perkembangan teknologi informasi. Karena sebagai fenomena perubahan paradigma, dimana pun negara-negara di dunia, khususnya negara hukum modern (yang sudah maju maupun berkembang) sistem peradilannya secara langsung atau tidak langsung merespons terjadinya sebuah interaksi sosial (masyarakat pencari keadilan) dengan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan modern sesungguhnya merupakan salah satu ciri peradilan yang excellent, yaitu manajemen dan kepemimpinan peradilan sebagai “driver” lembaga peradilan, sehingga akan memudahkan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya finansial, dan proses peradilannya. Harapan hasil dari peradilan yang excellent adalah dipenuhinya kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan dalam berproses di pengadilan, keterjangkauan dan mudah diaksesnya informasi perkara, dan adanya keterbukaan yang menimbulkan kepercayaan publik akan lembaga peradilan tersebut.

Pada Program PTSP Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Yogyakarta telah melaksanakan Pelayanan dalam satu meja pelayanan untuk pelayanan perkara perdata, pidana dan kepaniteraan hukum serta pelayanan surat masuk dalam satu meja pelayanan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik .

5. Penguatan anti korupsi melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu strateginya adalah “Strategi Pencegahan”.

Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan mutu layanan, seperti yang dicontohkan melalui pembentukan *pelayanan terpadu satu pintu* (PTSP). Namun, dalam implementasinya, persepsi masyarakat masih mencerminkan adanya kelemahan, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi.

6. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Implementasi SNI ISO 37001 : 2016 telah dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penetapan Inpres No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang diikuti dengan adopsi ISO 37001 : 2016 menjadi SNI ISO 37001 : 2016 melalui Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional No.248/KEP/BSN/11/2016 pada bulan November 2016. SNI ISO 37001 dirancang bagi organisasi untuk menaati peraturan perundang-undangan serta memiliki kemampuan untuk mencegah (*prevent*), mendeteksi (*detect*), dan menangani (*respond*) terjadinya tindak pidana suap dengan berdasar pada 6 prinsip yaitu prosedur yang proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji kelayakan (*due diligence*), komunikasi yang efektif, serta monitoring dan review/evaluasi. Penerapan keenam prinsip tersebut dilakukan dalam sebuah proses yang disebut PDCA yaitu *Plan, Do, Check, dan Act*. SMAP mendasarkan pada 44 klausul yang menjadi kriteria SMAP yang mana dalam penerapannya di Pengadilan Negeri hanya dilakukan pada 43 klausul karena 1 klausul yaitu adanya organ lain di bawah Pengadilan Negeri tidak diterapkan dalam penilaian.

Pada tahapan penerapan SNI ISO 37001 dilakukan persiapan yang meliputi training dan gap analysis, pengembangan sistem yang meliputi pengembangan kebijakan dan pengembangan dokumentasi, implementasi yang meliputi sosialisasi dan implementasi sistem, review sistem yang meliputi audit internal, tinjauan manajemen, dan persiapan sertifikasi, serta Sertifikasi yang meliputi pemilihan lembaga sertifikasi, pelaksanaan audit, perbaikan hasil audit, dan keputusan sertifikasi. Pengadilan negeri yang diajukan sebagai *pilot project* saat itu diminta untuk melakukan *bribery assesment* terhadap titik-titik rawan suap serta membuat program kerja untuk mengawasi titik-titik rawan suap tersebut. Dalam penerapannya, sistem yang telah ada dalam rangka melakukan pencegahan,

pendeteksian, dan penindakan atas perilaku suap disinergikan dalam rangka pengendalian suap dan gratifikasi serta penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Terhadap sistem yang telah terbangun dan mendapatkan akreditasi maka akan dilakukan *surveillance* pada setiap 1 tahun dan jika ditemukan pelanggaran maka sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 bisa dicabut.

Adapun dasar dari pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Yogyakarta yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) serta Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1730/SEK/OT.01.2/I2/2020 Tanggal 16 Desember 2020 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

Tujuan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini yaitu untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 dan juga sebagai barometer untuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini berisi tentang kegiatan-kegiatan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

B. VISI dan MISI

1. Visi Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI :
"Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Agung"
2. Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta juga sesuai dengan Misi Mahkamah Agung RI yaitu :
 - a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA.
 - b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 - c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA.
 - d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA

C RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas perlu adanya suatu perencanaan strategis di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA

yang terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitasnya. Sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran atau variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

1. Terciptanya fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Terciptanya pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Terciptanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Terciptanya manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
5. Tersedianya / terpenuhi sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas operasional terhadap sistem pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan yang ada pada tahun 2020 adalah:

- a. Program dari lembaga Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam DIPA adalah:
 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dalam program ini, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA yang merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama, selalu berupaya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum dalam rangka mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum pada umumnya dan kepada institusi lainnya beserta infrastruktur yang ada, sehingga diharapkan terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas, sehingga pelayanan prima dalam penegakan hukum dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
 2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Pada Program ini di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA tersedia anggaran untuk perkara operasional persidangan PHI, Pengamanan Persidangan dan Pemberian Konsumsi bagi Terdakwa, pembebasan biaya Perkara dan adanya pelayanan Pos Bantuan Hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung

Pada Program ini pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial, Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Yogyakarta tersedia anggaran untuk pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran serta Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Teknologi Informasi.

D. PERISTIWA PENTING

Peristiwa Penting tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020 :

1. Penyampaian Laporan Kegiatan Tahun 2019, Penandatanganan Mou dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM

Rabu, 22 Januari 2020, Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta. dilaksanakan Kegiatan Penyampaian Laporan Kegiatan Tahun 2019, Penandatanganan Mou dan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam rangka meningkatkan layanan *core business* pengadilan di bidang penyelesaian perkara dan mewujudkan pengadilan yang ramah dan bersahabat dengan masyarakat, kami telah mengadakan kerjasama dengan beberapa *stakeholder*, seperti Kesepakatan Bersama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta tentang Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta, Kesepakatan Bersama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan PERADI dan Walikota Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Kesepakatan Bersama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Kepala Kantor Pos Yogyakarta 55000 Tentang Layanan Penerimaan PNPB Fungsional dan Layanan Pos Lainnya, Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta (RSUD Yogyakarta) dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Layanan dan Aparatur Peradilan yang Beraktifitas di Lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kesepakatan Bersama Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Yayasan SAPDA Yogyakarta tentang Pendampingan Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan Dengan Hukum, Kesepakatan Bersama Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan LSM Rifka Annisa Yogyakarta Tentang Pendampingan Perempuan dan Anak Berhadapan Hukum dan Penyelenggaraan Layanan Konseling Laki-laki Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kesepakatan Bersama Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Radio Retjo Buntung tentang Penyuluhan Hukum Pada Kota Yogyakarta, Kesepakatan Bersama dengan Dinas Dukcapil tentang Pelayanan Terpadu Identitas Hukum bagi Masyarakat Kota, Kesepakatan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Satpol PP Kota Yogyakarta tentang Sistem Peradilan

Pidana Terpadu (SPPT) untuk Tipiring, Kesepakatan Bersama dengan lingkungan Akademisi yaitu dengan Fakultas Hukum UGM, UII, UIN, dan UAD.

Dalam laporannya, disampaikan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta, terutama yang sangat disoroti publik dan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik. Seperti pada perkara anak, yang sampai pada proses persidangan grafiknya menurun, sedangkan yang dapat diselesaikan secara diversi boleh dikatakan meningkat. Namun berdasarkan berita yang beredar akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak-anak yang dikenal dengan istilah “Klitih” menunjukkan trend yang sudah meresahkan masyarakat, oleh karena itu perlu kajian yang lebih mendalam tentang hal ini.

Dengan kerjasama dan berbagai inovasi yang ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Yogyakarta memperoleh pencapaian yang luar biasa di tahun 2019, yang mana Pengadilan Negeri Yogyakarta memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Sertifikat ISSO 370001:2016 atau yang dikenal dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Pengadilan Negeri Yogyakarta akan berusaha keras untuk mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagai langkah lanjut dari telah diperolehnya Predikat WBK. Dalam rangka mencapai predikat tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta ingin lebih meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di semua lapisan, baik di dunia pendidikan, pengembangan anak, pertukaran data maupun pengadilan yang ramah bagi penyandang disabilitas.





2. Pembinaan dan Pendampingan Persiapan Lomba PTSP Oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Tanggal 24 Juni 2020, Pengadilan Tinggi Yogyakarta melakukan Pembinaan dan Pendampingan Lomba PTSP.



3. Workshop Pemenuhan Hak Aksesibilitas dan Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dilingkungan Pengadilan.
Rabu 26 Agustus 2020, untuk mendukung pengadilan memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Yayasan SAPDA bersama Pengadilan Negeri Yogyakarta menginisiasi workshop dengan topik pemenuhan hak aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum melalui penerapan penilaian personal dan ketersediaan sistem rujukan yang memadai.



4. Pelaksanaan Rapid Test pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

18 September 2020, berada di ruang Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta dilaksanakan pemeriksaan Rapid Test COVID -19 sebagai salah satu upaya untuk memutus penularan virus corona bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta. dan juga sebagai bentuk Screening awal dari potensi penyebaran virus COVID-19. Dalam pelaksanaan rapid test covid 19 ini Pengadilan Negeri Yogyakarta bekerja sama dengan Rumah Sakit Ull Yogyakarta. Rapid test adalah pemeriksaan antibodi sebagai deteksi awal untuk mengetahui keadaan saat ini dalam mencegah penularan COVID-19.



5. Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial serta Pengawasan oleh Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia Secara Virtual.

Senin 12 Oktober 2020, Pengadilan Negeri Yogyakarta mengikuti undangan pembinaan teknis secara virtual di ruang Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta. Acara ini diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Seluruh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sedangkan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. menghadiri langsung kegiatan tersebut.

Adapun materi kegiatan pada acara ini yaitu pembinaan bidang teknis dan administrasi yudisial serta pengawasan oleh Pimpinan Mahkamah Agung, dan pembinaan oleh Pejabat Eselon I Mahkamah Agung, sesuai dengan bidang masing-masing. Acara ini juga dihadiri oleh Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia dan Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia



6. Kunjungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka tangkegiatan monitoring penyiapan penyelenggaraan pelayanan public ramah kaum rentan pada kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020 – 15 Juli 2020



7. Evaluasi Lomba PTSP oleh Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 7 Agustus 2020, dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta berhasil mendapatkan juara III.



8. Pendampingan ZI oleh Tim Badan Pengawasan

Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta kelas IA dalam rangka Monitoring Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan Surat Tugas Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 498/BP/ST/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020.

Monitoring dilakukan bertujuan untuk melihat dan menilai kesiapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta menghadapi tim TPN ZI dan lebih luasnya kesiapan dalam menuju WBBM. Monitoring yang dilakukan mencakup beberapa ruang lingkup, antara lain:

1. Pengujian atas Kesesuaian PMPZI dengan persyaratan pengajuan calon unit kerja berpredikat menuju WBBM.
2. Pengujian atas Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
3. Pengujian Kesiapan Presentasi dan Publikasi Hasil Pembangunan Zona Integritas
4. Pengujian Kesiapan Sarana dan Prasarana Layanan Peradilan



9. Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam rangka menjamin kualitas Manajemen Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Yogyakarta, Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Yogyakarta, sesuai surat Dirjen Badilum Nomor 935/DJU/HM02.3/9/2020 Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapat jadwal pada tanggal 14 Oktober 2020. Namun pada akhirnya jadwal Surveillance APM Pengadilan Negeri Yogyakarta diundur menjadi hari Jumat 16 Oktober 2020 dikarenakan berbarengan dengan jadwal Fit & Proper Test Hakim. Surveillance APM dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Zoom meeting dibagi beberapa room/area, yaitu Top Management, PTSP, Kepaniteraan Pidana & Perdata, Kepaniteraan Hukum, Umum & Keuangan serta Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.



10. Kunjungan DPC Permahi DIY ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Kunjungan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) yang diwakili oleh Saudara Amir Hajar N , Mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas Islam Negeri Yogyakarta beserta rekan , Selasa tanggal 20 Oktober 2020 diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta , Ibu Frida Ariyani, S.H.M.Hum di dampingi oleh Bapak Nuryanto, SH.MH, dan Bapak A Suryo Hendratmoko, SH selaku hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan ibu Dian Umawati, SH,MH selaku Panitera Muda Hukum.



11. Peresmian Ruang Tamu Terbuka “Yustisia Nada” Pengadilan Negeri Yogyakarta

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Frida Ariyani, SH, M.Hum secara resmi melaunching ruang tamu terbuka “Yustisia Nada” tepatnya hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB, yang didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak DR.Fahmiron, SH, MH, Panitera Bapak Zulfahmi Anwar, SH,MH, Sekretaris Bapak Widodo Budi Santoso, SH,MH dihadiri oleh Bapak Ibu Hakim dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta , Ibu Frida Ariyani, SH, M.Hum dalam sambutan nya berharap dengan adanya ruang tamu terbuka yang difasilitasi dengan audio visual yang baik, tata ruang yang indah serta pencahayaan yang terang dapat membuat pihak luar yang berkunjung di Pengadilan Negeri Yogyakarta merasa nyaman dan menghilangkan Paradigma yang kaku terhadap pengadilan. Ruang tamu terbuka “Yustisia Nada” ini selain disediakan untuk pengunjung, juga dapat dinikmati oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melepas lelah setelah seharian bekerja dan me-*refresh* suasana dengan melantunkan lagu – lagu. Ruang ini dilengkapi dengan perangkat multimedia yang dapat menunjang kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta seperti zoom meeting yang sering sekali digunakan untuk masa pandemi Covid-19.



12. Kunjungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapat kunjungan perwakilan dari Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 13.30 WIB, diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Frida Ariyani, SH, M.Hum di damping Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta bapak Widodo Budi Santoso, SH, MH diruang tamu terbuka Yustisia Nada.

Bapak Nasri, M.T., M.Mar.E sebagai Wakil Direktur I Akademi pada PIP Semarang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melakukan studi banding Zona Integritas dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan Pengadilan yang telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri PANRB Bapak Tjahjo Kumolo.



13. Desk Evaluasi Zona Integritas Menuju WBBM

Jumat, 6 November 2020 bertempat di Ruang Command Center, Ketua Pengadilan, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. beserta Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Yogyakarta menyampaikan pemaparan terkait Pelaksanaan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh Ibu Astri Mefayani dan Ibu Nabila serta didampingi oleh Tim Penilai Internal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB nomor : B/158/PW.03/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas Tahun 2020.

Acara Evaluasi dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Pemaparan diawali dengan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menyampaikan visi misi serta motto Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A. Pengadilan Negeri Yogyakarta berada pada kelompok G dan dimulai pukul 14.15 sampai dengan pukul 15.30 WIB. Pelaksanaan Desk Evaluasi dilakukan selama 75 menit, dengan pembagian 20 menit pertama pemaparan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait pengimplementasian 6 area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, sementara 55 menit selanjutnya dilakukan diskusi dan sesi tanya jawab kepada Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A.





14. Wawancara dengan PPATK Mengenai Riset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor B/53/PR.03/IX/2020 riset Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Adapun kegiatan riset dimaksud sedang dalam tahap pengumpulan data/informasi dari instansi penegak hukum yang terkait, dalam hal ini kegiatan dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Kegiatan dilakukan dalam bentuk diskusi/wawancara. Adapun sebelum kegiatan dilakukan, pihak PPATK mengirimkan kuisisioner yang diisi dari perwakilan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kuisisioner tersebut terdapat di surat undangan kegiatan wawancara.

Kegiatan dilakukan di ruang Command Center Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada hari Selasa, 10 November 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu ingin mengetahui sejauh mana perkara TPPU telah diselesaikan oleh hakim, baik yang bentuk nya sebagai perkara Pidana Biasa ataupun perkara TPPU menjadi satu kesatuan dengan perkara Tipikor. PPATK ingin mengetahui sejauh mana modus operandi tindak pidana melakukan pencucian uang dalam tindak pidana. Kegiatan diawali oleh sambutan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. kepada Panitera Muda Pidana Umum MA-RI Ibu Sudharmawatiningsih, SH, M.Hum, dan tim perwakilan dari PPATK Bapak Said Imron beserta tim.



BAB II
KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

1. Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama

1. Perkara Perdata (Klasifikasi Perkara)

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
1	PN Yogyakarta						
	Perdata Gugatan	54	192	246	8	166	72
	Perdata Permohonan	13	282	295	2	267	26
	Gugatan Sederhana	0	10	10	0	10	0
	Perlawanan/Derden Verzet	0	8	8	2	3	4
	PHI	2	23	25	0	12	13
	Jumlah	69	515	584	12	458	114

2. Perkara Pidana (Klasifikasi Perkara)

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
1	PN Yogyakarta						
	Pidana Biasa	65	335	400	0	338	62
	Pidana Singkat	0	1	1	0	1	0
	Pidana Cepat	0	292	292	0	292	0
	Lalu lintas	0	18.397	18.397	0	18.397	0
	Tindak Pidana Korupsi	8	7	15	0	15	0



No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
	Pidana Anak	5	21	26	0	23	3
	Pidana Praperadilan	0	1	1	0	1	0
	Jumlah	78	19.054	19.132	0	19.067	65

Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri

No	Pengadilan	Jumlah Terdaftar	SKUM (Rp)	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total
1	PT Yogyakarta							
1	PN Yogyakarta	474	308.084.900,00	184	272	8	10	474
	Jumlah	474	308.084.900,00	184	272	8	10	474

. Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding

1. Perkara Perdata Banding (Klasifikasi Perkara)

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
1	PN Yogyakarta						
	Perdata Gugatan	20	30	50	0	34	16
	Perdata Permohonan	-	-	-	-	-	-
	Gugatan Sederhana	-	2	-	-	-	-



No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
	Perlawanan/Derden Verzet	0	2	2	0	2	0
	PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah		20	34	52	0	36	6

2. Perkara Pidana Banding (Klasifikasi Perkara)

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
1	PN Yogyakarta						
	Pidana Biasa	5	17	22	1	19	2
	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
	Lalu lintas	-	-	-	-	-	-
	Tindak Pidana Korupsi	0	10	0	0	0	10
	Pidana Anak	0	3	3	0	2	1
	Pidana Praperadilan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		5	27	25	1	21	13

3. Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

1. Perkara Perdata Kasasi (Klasifikasi Perkara)

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
1	PN Yogyakarta						
	Perdata Gugatan	26	18	44	0	8	36



No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
	Perdata Permohonan	-	1	-	-	-	-
	Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-	-
	Perlawanan/Derden Verzet	3	2	5	0	1	4
	PHI	0	7	7	0	1	6
Jumlah		29	27	56	0	10	46

2. Perkara **Pidana Kasasi** (Klasifikasi Perkara)

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
1	PN Yogyakarta						
	Pidana Biasa	11	13	24	2	9	13
	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
	Lalu lintas	-	-	-	-	-	-
	Tindak Pidana Korupsi	3	7	10	0	2	8
	Pidana Anak	0	2	2	0	0	2
	Pidana Praperadilan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		13	22	36	2	11	23

4. Tabel Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

1. Perkara Perdata PK (Klasifikasi Perkara)

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
----	--------------------	-----------	------------	------------------	------------	------------	-------------------



No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
1	PN Yogyakarta						
	Perdata Gugatan	4	4	8	0	1	7
	Perdata Permohonan	-	-	-	-	-	-
	Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-	-
	Perlawanan/Derden Verzet	-	-	-	-	-	-
	PHI	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4	4	8	0	1	7

2. Perkara Pidana PK (Klasifikasi Perkara)

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Total Beban 2020	Cabut 2020	Putus 2020	Sisa Perkara 2020
1	PN Yogyakarta						
	Pidana Biasa	0	1	1	-	-	1
	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
	Lalu lintas	-	-	-	-	-	-
	Tindak Pidana Korupsi	7	4	11	0	3	8
	Pidana Anak	-	-	-	-	-	-
	Pidana Praperadilan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	7	5	12	0	3	9



B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Perkara Perdata

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2019	Sisa Tahun 2019 Yg di Cabut 2020	Sisa Th 2019 yg di Putus 2020	Sisa Perkara 2019 Yg Belum diputus
1	PN Yogyakarta				
	Perdata Gugatan	54	14	39	1
	Perdata Permohonan	13	1	13	-
	Gugatan Sederhana	-	-	3	-
	Perlawanan (Derden Verzet)	1	-	1	1
	PHI				
	Jumlah	68	3	26	45

Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2019	Sisa Tahun 2019 Yg di Cabut 2020	Sisa Th 2019 yg di Putus 2020	Sisa Perkara 2019 Yg Belum diputus
1	PN Yogyakarta				
	Pidana Biasa	65	0	65	0
	Pidana Singkat	-	-	-	-
	Pidana Cepat	-	-	-	-
	Lalu lintas	-	-	-	-
	Tindak Pidana Korupsi	8	0	8	0
	Pidana Anak	6	1	5	0
	Pidana Praperadilan	-	-	-	-
	Jumlah	79	1	78	0



2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara Perdata

No	Pengadilan / Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putusan Kurang Dari 5.Bulan	Putusan Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2019	Masuk 2020			
1	PN Yogyakarta					
	Perdata Gugatan	54	192	122	122	-
	Perdata Permohonan	13	288	275	275	-
	Gugatan Sederhana	-	10	10	10	-
	Perlawanan (Derden Verzet)	1	1	1	1	-
	PHI	-	-	-	-	-
	Jumlah	68	491	408	408	

Perkara Pidana

No	Pengadilan / Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putusan Kurang Dari 5.Bulan	Putusan Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2019	Masuk 2020			
1	PN Yogyakarta					
	Pidana Biasa	65	335	338	336	2
	Pidana Singkat	0	1	1	1	0
	Pidana Cepat	0	292	292	292	0
	Lalu lintas	0	18.397	18.397	18.397	0
	Tindak Pidana Korupsi	10	7	17	14	3
	Pidana Anak	5	21	23	22	1
	Pidana Praperadilan	-	-	-	-	-
	Jumlah	80	19.053	19.068	19.062	6



3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Upaya Hukum Banding

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2019 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2020 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	PN Yogyakarta				
	Perdata Gugatan	28	-	17	148
	Perdata Permohonan	-	-	-	-
	Gugatan Sederhana	-	-	1	11
	Perlawanan/Derden Verzet	-	-	3	-
	PHI	-	-	-	-
	Jumlah				

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2019 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2020 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	PN Yogyakarta				
	Pidana Biasa	2	338	13	325
	Pidana Singkat	-	-	-	-
	Pidana Cepat	-	-	-	-
	Lalu lintas	-	-	-	-
	Tindak Pidana Korupsi	0	15	9	6
	Pidana Anak	0	23	3	20
	Pidana Praperadilan	-	-	-	-
	Jumlah	2	376	25	351



Upaya Hukum Kasasi

Perkara Perdata

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2019 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2020	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	PN Yogyakarta				
	Perdata Gugatan	2	9	12	6
	Perlawanan/Derden Verzet				
	Jumlah				

Perkara PHI

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Tk. I 2019 Belum BHT	Jumlah Putusan Tk. I 2020	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	PN Yogyakarta				
	PHI	0	16	7	9
	Jumlah				

Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2019 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2020 Yg Diterima dr PT	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	PN Yogyakarta				
	Pidana Biasa	4	19	13	10
	Pidana Singkat	-	-	-	-
	Pidana Cepat	-	-	-	-
	Lalu lintas	-	-	-	-
	Tindak Pidana Korupsi	0	7	4	3
	Pidana Anak	0	2	2	0
	Pidana Praperadilan	-	-	-	-
	Jumlah	4	28	19	13



Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Perkara Perdata

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2020 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2020 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2020	Permohonan PK Tahun 2020	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
1	PN Yogyakarta					
	Perdata Gugatan				4	
	Perdata Permohonan					
	Gugatan Sederhana					
	Perlawanan/Derden Verzet					
	PHI					
	Jumlah					

Perkara Pidana

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2020 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2020 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2020	Permohonan PK Tahun 2020	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
1	PN Yogyakarta					
	Pidana Biasa	321	5	9	1	0
	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
	Pidana Cepat	-	-	-	-	-
	Lalu lintas	-	-	-	-	-
	Tindak Pidana Korupsi	5	0	5	4	0
	Pidana Anak	23	0	0	0	0
	Pidana Praperadilan	-	-	-	-	-
	Jumlah	349	5	14	5	



4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Mediasi	Status			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Proses Mediasi	Tidak dapat dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	109	6	96	7	83
Jumlah						

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	21	3	0	3	0
Jumlah						

C. Akreditasi Penjaminan MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

No	Satuan Kerja	Organisasi Pemberi Layanan	Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Ket
1	PN Yogyakarta	Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA	526 Layanan	48.000.000	48.000.000	0	
Jumlah							



Menurut SEMA Nomor:10 Tahun 2010, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Umum diartikan sebagai ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Ruang Posbakum digunakan untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Posbakum diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Konsultasi
2. Pembuatan Dokumen Hukum
3. Pendampingan persidangan

Kendala yang dihadapi :

1. Resiko Penyalahgunaan wewenang (sebagai lapak menjual jasa)
2. Resiko penyuapan
3. Belum adanya system informasi posbakum, administrasi masih manual sehingga pengawasan dan monitoring masih manual

Langkah antisipasi dan penyelesaian :

1. Pakta Integritas semua petugas pos bakum
2. Voice Warning System anti penyuapan dan anti gratifikasi
3. Banner / Informasi Mekanisme Pengaduan
4. Monitoring tiap bulan oleh hakim pengawas



2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

No	Satuan Kerja	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Jumlah Serapan	Sisa Anggaran	Ket
1	PN Yogyakarta	0	0	0	0	0	
Jumlah							

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

No	Satuan Kerja	Target Perkara	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Jumlah Serapan	Sisa Anggaran	Ket
1	PN Yogyakarta	3 Perkara	1 Perkara	2760000	80000	2680000	
Jumlah							

Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA pada tahun anggaran 2020 ini mendapat alokasi anggaran dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang tertuang dalam DIPA No.005.03.099128/2020 untuk 3 (tiga) perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) Rp. 2,760,000,- terealisasi 1 (satu) perkara yaitu Rp. 320.000,-, sisa anggaran Rp. 2.440.000,-. hal ini disebabkan tidak adanya masyarakat yang mengajukan perkara baik perkara pidana maupun perdata yang dibiayai oleh pembebasan biaya perkara. Padahal dari Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui desa- desa akan tetapi tetap tidak ada perkara yang ditangani melalui prodeo.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

Penyelesaian perkara di tingkat pertama baik dari pendaftaran perkara sampai dengan putusan, minutas, upaya hukum maupun eksekusi.

Kendala yang dihadapi :

Pengguna layanan yang mendaftarkan perkara prodeo sangat sedikit, dikarenakan tingkat ekonomi masyarakat sudah baik

Langkah antisipasi dan penyelesaian :

Sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media masa maupun website.



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi. Adapun keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2020

No	No	Nama	NIP	Jabatan	Pangkat
KETUA, WAKIL KETUA DAN HAKIM					
1	1	FRIDA ARIYANI, SH.,M.Hum	19680203 199212 2 001	Wakil Ketua	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	2	LILIK NURAINI, SH	19620218 198512 2 001	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya (IV/d)
3	3	P.COKRO HENDRO MUKTI, SH	19650920 199203 1 004	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
4	4	HERIYANTI, SH.,MH	19671206 199212 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
5	5	TITIK BUDI WINARTI, SH.,MH	19600115 199212 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
6	6	IDA RATNAWATI, SH.,MH.	19670612 199212 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
7	7	ASEP PERMANA,SH.,MH	19600131 198503 1 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
8	8	TAUFIK RAHMAN,SH	19580708 199212 1 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
9	9	SARI SUDARMI, SH	19650506 199212 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
10	10	SUNDARI, SH.,MH	19640704 199212 2 002	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
11	11	RINA ZAIN, SH	19660301 199103 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
12	12	NENDEN RIKA PUSPITASARI,SH.MH	19660724 199403 2 005	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
13	13	TRI RACHMAT SETIJANTA, SH.,MH	19651012 198603 1 002	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
14	14	NURYANTO, SH.,MH	19671121 199403 1 007	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
15	15	SUPARMAN, S.H.,M.H.	19640820 199212 1 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
16	16	ERNA INDRAWATI, SH.,MH	19620927 199003 2 001	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda (IV/c)
17	17	NASRULLOH, SH	19690724 199603 1 002	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
18	18	SRI ARI ASTUTI, SH.,MH	19700414 199603 2 001	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
19	19	PURNAMA, SH.,MH	19681006 199603 1 001	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
20	20	TRI RISWANTI, SH.,M.Hum	19710222 199603 2 001	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
21	21	AGUS NAZARUDDINSYAH, SH	19710228 1992031003	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
22	22	MAHAPUTRA, SH., MH.	19610706 1990031007	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
23	23	MOCH. ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH	19690320 1994031002	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)

24	24	A.SURYO HENDRATMOKO, SH	19711112 1999031004	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
25	25	HERI KURNIAWAN, SH.,MH	19720831 1994031002	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
26	26	WIYANTO, SH.,MH	19690904 1992031005	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
27	27	AGUS SETIAWAN, SH.,Sp.Not	19740808 2000121001	Hakim Madya Muda	Pembina Tk.I (IV/b)
STRUKTURAL KEPANITERAAN (TEKNIS)					
28	1	ZULFAHMI ANWAR, SH.,MH	19621231 198312 1005	Panitera	Pembina Tk.I (IV/b)
29	2	NARTI HARTATI, SH	19670222 198903 2001	Panitera Muda Perdata	Penata Tk.I (III/d)
30	3	NANIK MULYANI SRI UTAMI, SH	19660405 198502 2001	Panitera Muda Pidana	Penata Tk.I (III/d)
31	4	KISWANTANA,SH	19690527 199403 1002	Panitera Muda Tipikor	Penata Tk.I (III/d)
32	5	DIAN UMAWATI,SH.MH	19780708 200604 2001	Panitera Muda PHI	Penata Tk.I (III/d)
33	6	EKA SURYA SETIAWAN, SH	19760613 200012 1001	Panitera Muda Hukum	Penata Tk.I (III/d)
PANITERA PENGGANTI					
34	1	THESIANA MAYA FITRIA A, SH.,MH	19780127 200212 2 003	Panitera Pengganti	Pembina (IV/a)
35	2	KUS YULIANI,SH	19640801 199203 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
36	3	RR.DINAWATI, SH	19671020 199303 2 005	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
37	4	Rr. SRI WINASTUTI,SH	19690714 199403 2 005	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
38	5	ANNA HENY W,SH	19660602 199903 2 003	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
39	6	MARIA LUSIATI,SH	19691115 199203 2 004	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
40	7	KUWAT WAHYU MURDANA,SH	19690805 199203 1 004	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
41	8	YANI WIDIYANTI, SH	19700119 199203 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
42	9	SRI SUWANTI, SH	19700610 199203 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
43	10	NURI MAHAR KESTRI,SH	19750905 200112 2 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
44	11	NOORMAN NEFONANTO,SH	19640109 198903 1 003	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
45	12	NUNUNG DIAH RST, SH	19660409 199003 2 003	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
46	13	ANTONIUS ANDI SUSANTO, SH	19711110 200604 1 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
47	14	SURYONO NUGROHO,SH	19660518 198803 1 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
48	15	DEWI INDRIYANI, SH	19830427 200805 2 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
49	16	HERI SANTOSA, SH	19820331 200805 1 001	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
50	17	M.V. NANIK SETIASIH	19631210 198503 2 002	Panitera Pengganti	Penata Tk.I (III/d)
51	18	TUNTUM RAHAYU,SH	19620507 198603 2 005	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
52	19	RULLIANA YUDAWATI, SH	19790709 200904 2 004	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
53	20	YUDHA AYU TIMORNIYATI, SH	19760615 200604 2 002	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
54	21	RR. WORO HAPSARI D,SH	19770607 200012 2 002	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
55	22	RIKE SIMBALAGO, SH	19850805 200912 2 005	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
56	23	NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, SH	19820706 201101 2 009	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
57	24	EKO WAHONO, SH	19800330 200212 1 002	Panitera Pengganti	Penata (III/c)
58	25	AGUS RIYANTO, SH	19711106 199303 1 002	Panitera Pengganti	Penata (III/c)

JURUSITA					
59	1	HERI PRASETYA, SH	19730626 199403 1 003	Juru Sita	Penata Tk I (III/d)
60	2	LUSI RACHMAYANI,SE.SH	19750825 200604 2 003	Juru Sita	Penata Tk.I (III/d)
61	3	HERI CATUR PUDIYANTO	19670414 199303 1 004	Juru Sita	Penata (III/c)
62	4	NANANG SUPRIYADI, SE.,SH.,M.Kn	19730525 200604 1 004	Juru Sita	Penata (III/c)
63	5	ARLYO PERDANA PUTRA,SH	19800707 200805 1 001	Juru Sita	Penata (III/c)
64	6	NURMAYA REZEKY AR, SH	19800101 200805 2 002	Jurusita	Penata Muda Tk.I (III/b)
JURUSITA PENGGANTI					
65	1	INDRI HARI PURNOMO, SmHk	19630425 199303 1 004	Jurusita Pengganti / Staf	Penata Tk I (III/d)
66	2	NARSIYO	19641116 198903 1 003	Jurusita Pengganti / Staf	Penata (III/c)
67	3	JATMAKA	19630531 199003 1 003	Jurusita Pengganti / Staf	Penata (III/c)
68	4	WARSIYATI	19700117 199003 2 001	Jurusita Pengganti / Staf	Penata (III/c)
69	5	EDI SETYABUDI	19690305 199103 1 005	Jurusita Pengganti / Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)
70	6	DOMINGOS DOUDEL	19760101 199510 1 001	Jurusita Pengganti / Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)
71	7	SALASA AGUS EKOYADI.SH	19721004 199303 1 005	Jurusita Pengganti / Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)
72	8	MOHAMAD SAID IDUL FITRI, SH	19681221 199003 1 002	Jurusita Pengganti / Staf	Penata Muda Tk.I (III/b)
STRUKTURAL KESEKRETARIATAN (NON TEKNIS)					
73	1	WIDODO BUDI SANTOSO, SH	19730921 199303 1 004	Sekretaris	Pembina (IV/a)
74	2	WALJIYANTO,ST.,MM	19800831 200604 1 003	Ka.Sub Bag.Umum Dan Keuangan	Penata Tk I (III/d)
75	3	EVENDI NUGROHO,ST	19810330 200604 1 004	Ka.Sub Bag.Kepeg. Ortala	Penata Tk.I (III/d)
76	4	YENNY VIKY EFFENDY,ST.SH.M.Eng	19840410 200904 2 016	Ka.Sub Bab Perencanaan, IT & Pelaporan	Penata (III/c)
STAFF					
77	1	ENY KISDARYANTI,SE.,SH	19791028 200904 2 002	Analisis Perkara-Pidana	Penata (III/c)
78	2	JEANNE PAMELA,S.Kom,MT	19820922 200904 2 008	Analisis Humas-Umum dan Keu	Penata (III/c)
79	3	KUNCORO SETYA R,SE.,MM	19860724 201101 1 005	Penyusun Laporan Keuangan	Penata (III/c)
80	4	YUDI WIDIARSONO, S.Kom	19800917 201101 1 004	Bendahara-Umum dan Keu	Penata (III/c)
81	5	ANJAR DWIYANTO, SH	19691204 200701 1 002	Pengelola Data dan Informasi Hukum	Penata Muda Tk.I (III/b)
82	6	ARDI WICAKSONO, ST	19851018 201503 1 001	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Penata Muda Tk.I (III/b)
83	7	TAUFIK HENDRAWAN, SE	19861122 201101 1 004	Bendahara-Perdata	Penata Muda (III/a)
84	8	NUGRAHA ABDILLAH, S.Kom	19910203 201903 1 005	Pranata Komp.Ahli Pertama-PTIP	Penata Muda (III/a)
85	9	NOVITA DIASTUTI, A.Md	19891126 201503 2 003	Pengelola Kepegawain-Kortala	Pengatur Tk I (II/d)
86	10	MOH. RUSDIANTO	19721216 199303 1 001	Teknisi Sarana dan Prasarana-Umum	Pengatur (II/c)
87	11	NINDYA YOSDALU PUTRA	19780619 201408 1 004	Pengadministrasi Hukum	Pengatur Muda Tk.I(II/b)
HAKIM AD HOC PHI					
88	1	DANI RUSDIYAH, ST.SH		HAKIM AD HOC PHI	
89	2	DIAH SUSILOWATI,SH		HAKIM AD HOC PHI	
90	3	HERI PURNOMO, S.Si		HAKIM AD HOC PHI	
HAKIM AD HOC TIPIKOR					
91	1	SAMSUL HADI,SH.MSc		HAKIM AD HOC TIPIKOR	
92	2	RINA LISTYOWATI,SH.,MH		HAKIM AD HOC TIPIKOR	

93	3	SYAMSUL BAHRI, SH		HAKIM AD HOC TIPIKOR	
94	4	ENCANG HERMAWAN, SH		HAKIM AD HOC TIPIKOR	
HONORER					
96	1	DONI SURIPTO		TENAGA HONORER	
97	2	KEMAS INDARTO		TENAGA HONORER	
98	3	WIRIT WINOTO		TENAGA HONORER	
99	4	NGADIYO		TENAGA HONORER	
100	5	BAMBANG NUGROHO A MARTANTYO		TENAGA HONORER	
101	6	BUDI PRASETYO		TENAGA HONORER	
102	7	ANDIK SULISTYO		TENAGA HONORER	
103	8	FARIDHOTUL KHASANAH		TENAGA HONORER	
104	9	SUGITO		TENAGA HONORER	
105	10	DENY DWI SUSILO		TENAGA HONORER	
106	11	PEBRIANTO		TENAGA HONORER	
107	12	SAPTO BAHTIAR		TENAGA HONORER	
108	13	FAHMI HIDAYAT		TENAGA HONORER	
109	14	SUDARMADI		TENAGA HONORER	
110	15	ARIF PRIHENDARTO		TENAGA HONORER	
111	16	DWI RIYANTO		TENAGA HONORER	
112	17	TUNJUNG SULAKSANA P		TENAGA HONORER	
113	18	DIAH SUKORINI,SH		TENAGA HONORER	
114	19	ANGGA PERDANA PUTRA		TENAGA HONORER	
115	20	BARIYAH		TENAGA HONORER	

Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Hakim (36 Orang)						Teknis (50 Orang)						Non Teknis (103 Orang)				Jml
			Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Hakim Ad Hoc Tipikor	Hakim Ad Hoc PHI	Hakim Yustisial	Panitera	Wakil Panitera	Panitera Muda	Panitera Pengganti	Juru Sita	Juru Sita Pengganti	Sekretaris	Ka Bagian	Ka Sub Bagian	Staf	
1	PN Yogyakarta	IA	1	1	25	5	3	-	1	-	5	25	6	8	1	3	11	5	95
Jumlah			1	1	25	5	3		1		5	25	6	8	1	3	11	5	95

Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan berdasarkan Pangkat / Golongan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Satuan Kerja	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	PN YOGYAKARTA	-	1	7	2	48	27	2	87
Jumlah		0	1	7	2	48	27	2	87



B. PROMOSI / MUTASI

Rekapitulasi Promosi / Mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai Tahun 2020

NO	NAMA	-TMT. MUTASI MASUK -JABATAN LAMA -JABATAN BARU	-TMT. MUTASI KELUAR -JABATAN LAMA -JABATAN BARU
1	2	3	4
1	MUSTAJAB, S.H., M.H	- 09-03-2020 HAKIM PN BALIKPAPAN HAKIM PN YOGYAKARTA	
2	AGUS RIYANTO, SH	- 09-03-2020 PP PN SLEMAN PP PN YOGYAKARTA	
3	ARIF BUDIAWAN, SH		- 12-03-2020 STAF PN YOGYAKARTA JURUSITA PN WATES
4	SATRIYO WIRATMOYO, SH		- 13-03-2020 PANMUD PIDANA PN YOGYAKARTA PP PT YOGYAKARTA
5	RINA ZAIN, SH		- 13-03-2020 HAKIM PN YOGYAKARTA HAKIM PN CIBINONG
6	MOCHAMAD ARIF SATRIYO WIDODO, S.H., M.H	- 16-03-2020 HAKIM PN BANJARMASIN HAKIM PN YOGYAKARTA	
7	NARTI HARTATI, SH	- 17-03-2020 PANMUD PERDATA PN SLEMAN PANMUD PIDANA PN YOGYAKARTA	
8	RATNA DEWANTI, SH		- 17-03-2020 PP PN YOGYAKARTA PANMUD PIDANA PN SLEMAN
9	KUN MARYOSO,S.H., M.H.		- 01-04-2020 HAKIM PN YOGYAKARTA HAKIM PT AMBON
10	ANJAR DWIYANTO, SH	- 20-05-2020 STAF PT YOGYAKARTA STAF PN YOGYAKARTA	
5	ASEP PERMANA, SH.,MH		- 02-06-2020 HAKIM PN YOGYAKARTA

8	NURMAYA REZEKY, AR,SH	- 02-06-2020 JURUSITA PN MAGELANG JURUSITA PN YOGYAKARTA	HAKIM PN SEMARANG
9	TAUFIK RAHMAN, SH		- 05-06-2020 HAKIM PN YOGYAKARTA HAKIM PN PALEMBANG
10	ARDI WICAKSONO, ST	- 08-06-2020 STAF PELAKSANA PN MAKALE STAF PELAKSANA PN YOGYAKARTA	
11	BUDI PRASETYO.SH.,MH		- 19-06-2020 KETUA PN YOGYAKARTA HAKIM TINGGI PT PEKANBARU
12	Dr.FAHMIRON, SH.,M.Hum	- 13-07-2020 HAKIM PN JAKARTA SELATAN WKPN YOGYAKARTA	
13	HERI KURNIAWAN, SH.,MH	-20-07-2020 KPN MANNA HAKIM PN YOGYAKARTA	
14	HERI PURNOMO, S.Si	-01-09-2020 - HAKIM AD HOC PHI PN TERNATE - HAKIM AD HOC PHI PN YOGYA	
15	SHEILA POSITA, SH.,MH		- 14-12--2020 PELAKSANA/STAF PN YOGYAKARTA PANITERA PENGGANTI PN SLEMAN
16	RATMIYATI, SH		- 18-12--2020 PANMUD PERDATA PN YOGYAKARTA PP PT YOGYAKARTA
17	YULITA SRI WIDAYATI, SH		- 18-12--2020 PP PN YOGYAKARTA PANMUD PERDATA PN BANTUL
18	SRI BAKHRIYATUN K, SE.,SH		- 18-12--2020 JSP PN YOGYAKARTA PANITERA PENGGANTI PN BANTUL

19	EKA SURYA SETIAWAN, SH	-18-12-2020 - PANMUD HUKUM PN BANTUL - PANMUD HUKUM PN YOGYAKARTA	
20	DWI KRISYANTO, SE.,SH.,MH		- 21-12--2020 PELAKSANA/STAF PN YOGYAKARTA PANITERA PENGGANTI PN WATES

C. PENSIUN

Rekapitulasi pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Pegawai dan Hakim Pensiun / Meninggal Dunia Tahun 2020

NO	NAMA	KETERANGAN PENSIUN / MENINGGAL DUNIA
1	2	4
1	A.IRIN HINDRIYANI	- 01-01-2020 - JURUSITA PN YOGYAKARTA - PENSIUN
2	SUTARJA, SH	- 01-02-2020 - KASUBBAG UMUM DAN KEU PN YOGYA - PENSIUN
3	SURYANTO, SH	- 07-07-2020 HAKIM PN YOGYAKARTA MENINGGAL DUNIA
4	RIANDINI, SH	- 01-08-2020 - PANITERA PENGGANTI PN YOGYAKARTA - PENSIUN
5	ENDANG SUSILOWATI	- 01-08-2020 - JURUSITA PENGGANTI PN YOGYAKARTA - PENSIUN
6	RIHATIN BOEDIJONO, SH.,MH	- 01-09-2020 - HAKIM AD HOC PHI - PENSIUN
7	ROSALIA SUNARNI, Sm.Hk	- 01-10-2020 - JURUSITA PENGGANTI PN YOGYAKARTA - PENSIUN
8	SRI WARNI WATI, SH.,MH	- 08-10-2020 - HAKIM PN YOGYAKARTA - MENINGGAL DUNIA

Rekapitulasi pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Batas Usia Pensiun	Meninggal	Pensiun Dini	Jumlah
1	PN Yogyakarta	IA	6	2	-	8
Jumlah			6	2	-	8

D. DIKLAT

Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Diklat Hakim dan Pegawai Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Jenis Diklat				Jumlah
			Diklat PIM III	Diklat PIM IV	Diklat Teknis	Diklat Fungsional	
1	PN Yogyakarta	IA	-	3	59	2	
Jumlah			-	-	-	-	

Diklat Hakim dan Pegawai Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT	WAKTU PELAKSANAAN
1	Nugraha Abdillah, S.Kom.	CPNS	Pelatihan Pranata Komputer Tahun 2020	16 s/d 27 Februari 2020
2	Zulfahmi Anwar, SH.,MH	Panitera	Bimbingan Teknis Tanda Tangan Elektronik pada Salinan Putusan di Aplikasi e-Court	16 s.d 18 Februari 2020
3	Yenny Vikky Effendy, ST., SH., M. Eng.	Kepala Sub Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pelatihan <i>Service Excellence</i> Secara <i>Online</i> Tahun 2020	13 April 2020 s.d 8 Mei 2020
4	Binsar Pantas Parmonangan Sihaloho, SH	Hakim Ad Hoc Tipikor	Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXI bagi Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama dan Banding Seluruh Indonesia melalui metode pembelajaran jarak jauh (E-learning)	8 s.d 19 Juni 2020
5	Agus Setiawan, SH., Sp.Not	Hakim	Pelatihan <i>Online Risk Management For Public Sector (Manajemen Resiko) Batch 1A s.d 1D Tahun 2020</i>	15 s.d 19 Juni 2020
6	Frida Ariyani, SH.,M.Hum	Ketua/Hakim	Pelatihan <i>Online Menulis Policy Brief Tahun 2020</i>	6 s.d 10 Juli 2020
7	Waljiyanto, ST.,MM	Kepala Sub Bag. Umum dan Keuangan	Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang II dari Tempat Kerja Tahun 2020	13 Juli s.d 24 Oktober 2020



8	Agus Setiawan, SH., Sp.Not	Hakim	Pelatihan Online Menulis Laporan Efektif Batch 1 Tahun 2020	13 s.d 17 Juli 2020
9	Frida Ariyani, SH.,M.Hum	Ketua/Hakim	Pelatihan Online Menulis Laporan Efektif Batch 1 Tahun 2020	13 s.d 17 Juli 2020
10	Zulfahmi Anwar, SH.,MH	Panitera	Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta	22 s.d 24 Juli 2020
11	Ratmiyati, SH	Panmud Perdata	Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta	22 s.d 24 Juli 2020
12	RR. Sri Winastuti, SH	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta	22 s.d 24 Juli 2020
13	Yulita Sri Widayati, SH	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta	22 s.d 24 Juli 2020
14	RR. Woro Hapsari Dewi, SH	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta	22 s.d 24 Juli 2020
15	Sheila Posita, SH.,MH	Analisis Perkara Peradilan	Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta	22 s.d 24 Juli 2020
16	Nugraha Abdilah, S.Kom	Pranata Komputer	Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta	22 s.d 24 Juli 2020
17	Nindya Yosdalu Putra	Pengadministrasi Hukum	Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta	22 s.d 24 Juli 2020
18	Wiyanto, SH.,MH	Hakim	Pelatihan Online Kepemimpinan Lini Pertama dari Tempat Tugas Tahun 2020	5 s.d 7 Agustus 2020
19	Agus Setiawan, SH., Sp.Not	Hakim	Pelatihan Online Kepemimpinan Lini Pertama dari Tempat Tugas Tahun 2020	5 s.d 7 Agustus 2020
20	Agus Setiawan, SH., Sp.Not	Hakim	Pelatihan <i>Online Basic Booklet Design With Adobe In Design-Kleas 01</i> dari Tempat Tugas Tahun 2020	24 s.d 28 Agustus 2020
21	Wiyanto, SH.,MH	Hakim	Pelatihan <i>Online Transformasi Bisnis Proses</i> dari Tempat Tugas Tahun 2020	7 s.d 9 September 2020
22	Widodo Budi Santoso, SH	Sekretaris	BIMTEK RKAKL T.A 2021	25 Agustus 2020
23	Yenny Viky Effendy,	Kepala Sub Bag.	BIMTEK RKAKL T.A 2021	25 Agustus 2020



	ST,SH,M.Eng	Perencanaan, TI dan Pelaporan		
24	Nugraha Abdilah, S.Kom	Pranata Komputer	BIMTEK RKAKL T.A 2021	25 Agustus 2020
25	Yenny Viky Effendy, ST,SH,M.Eng	Kepala Sub Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang III dari Tempat Kerja Tahun 2020	31 Agustus s.d 4 Desember 2020
26	Ardi Wicaksono, ST	Pengelola Barang Milik Negara / Operator SIMAK-BMN	Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang III dari Tempat Kerja Tahun 2020	31 Agustus s.d 4 Desember 2020
27	Heri Prasetya, SH	Jurusita	Pelatihan Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	25 September s.d 9 Oktober 2020
28	Nurmaya Rezeky AR, SH	Jurusita	Pelatihan Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	25 September s.d 9 Oktober 2020
29	Agus Setiawan, SH., Sp.Not	Hakim	Pelatihan <i>Online</i> Inovasi Pengadilan Dalam Tatacara Normal Baru- Pendekatan Desain Berpikir Kelompok 2 Tahun 2020	22 s.d 24 September 2020
30	Ardi Wicaksono, ST	Pengelola Barang Milik Negara / Operator SIMAK-BMN	Pelatihan <i>Online Basic Video Editing Kelas 01 sd Kelas 03</i> dari Tempat Tugas Tahun 2020.	14 s.d 18 September 2020
31	Moch Arif Satiyo Widodo, SH.,MH	Hakim	Pelatihan <i>Online</i> Kerjasama dengan PPM dari Tempat Tugas Tahun 2020	21 s.d 25 September 2020
32	Wiyanto, SH.,MH	Hakim	Pelatihan <i>Online</i> Kerjasama dengan PPM dari Tempat Tugas Tahun 2020	21 s.d 25 September 2020
33	Erna Indrawati, SH.,MH	Hakim	Pelatihan <i>Online</i> Pelatihan <i>Online</i> Inovasi Pengadilan Dalam Tatacara Normal Baru- Pendekatan Desain Berpikir dari Tempat Tugas Tahun 2020	22 s.d 24 September 2020.



34	Agus Setiawan, SH., Sp.Not	Hakim	Pelatihan <i>Online</i> SWOT di Pengadilan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) dari Tempat Tugas Tahun 2020	6 s.d 8 Oktober 2020
35	Widodo Budi Santoso, SH	Sekretaris	Bimbingan Teknis Bidang Kesekretariatan di Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta	14 s.d 16 Oktober 2020
36	Evendi Nugroho, ST	Ka Sub Bag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Bimbingan Teknis Bidang Kesekretariatan di Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta	14 s.d 16 Oktober 2020
37	Waljiyanto, ST.,MM.	Kepala Sub Bag Umum dan Keuangan	Bimbingan Teknis Bidang Kesekretariatan di Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta	14 s.d 16 Oktober 2020
38	Agus Setiawan, SH., Sp.Not	Hakim	Pelatihan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan ECPAT	19 s.d 21 Oktober 2020
39	Wiyanto, SH.,MH	Hakim	Pelatihan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan ECPAT	19 s.d 21 Oktober 2020
40	A.Suryo Hendratmoko, SH	Hakim	Pelatihan Pelatihan Online General English dari Tempat Tugas Tahun 2020,	19 s.d 23 Oktober 2020.
41	Agus Setiawan, SH., Sp.Not	Hakim	Pelatihan Pelatihan Online General English dari Tempat Tugas Tahun 2020,	19 s.d 23 Oktober 2020.
42	Heri Santosa, SH	Panitera Pengganti	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	6 s.d 19 November 2020
43	Rike Simbalago, SH	Panitera Pengganti	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	6 s.d 19 November 2020



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

I. PENGELOLAAN ANGGARAN DIPA

REKAPITULASI
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA
TAHUN ANGGARAN 2019 DAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
	B. Pegawai	17.049.196.000	17.029.410.980	99,88	38.424.231	16.950.059.000	16.874.147.661	99,55	75.909.339
	B. Barang Opr	2.076.205.000	2.032.707.396	97,0	43.497.604	2.418.659.000	2.353.673.789	97,31	64.985.211
	B. Barang Non Opr	25.200.000	25.200.000	100	0
	B. Modal	137.500.000	137.500.000	100	0.	25.000.000	24.600.960	98,40	399.040
	Jumlah 01	19.288.101.000	192.224.818.376	99,66	63.282.624	19.393.718.000	19.252.424.410	99,27	141.293590
	B. Barang (03)	289.704.000	284.646.000	98,25	5.058.000	269.654.000	265.896.557	98,61	2.680.000
	Jumlah 03	289.704.000	284.646.000	98,25	5.058.000	269.654.000	265.896.557	98,61	2.680.000
	Jumlah 01 + 03	17.049.196.000	17.029.410.980	99,88	38.424.231	19.663.372.000	265.896.557	98,61	2.680.000



Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 75.909.339,00 untuk belanja pegawai karena Sisa Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc yang diperkirakan pensiun, namun SK diperpanjang.

2. Belanja Barang Operasional

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 64.985.211,00 untuk Belanja Barang Operasional karena :

1. Sisa Belanja Pemeliharaan Gedung

2. Sisa Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

dikarenakan estimasi pengambilan tambahan uang persediaan (TUP) tidak mencukupi sampai dengan keseluruhan kebutuhan.

3. Belanja Barang Non Operasional

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp-.....,- untuk belanja pegawai karena-.....

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Terjadi sisa pagu penyerapan anggaran sebesar Rp 399.040,00 untuk belanja modal karena ongkos kirim belanja modal gratis dan sisa pagu tidak bisa direvisi ke akun lain.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terjadi sisa pagu anggaran sebesar Rp 3.757.338,00 dalam manajemen peradilan (DIPA Badan Peradilan Umum)/ Belanja Barang karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara karena hal-hal sebagai berikut :

A. 1049.005.004 Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat Pertama:

- 1 1049.005.003.051 : Dalam belanja Pendaftaran Berkas Perkara sebesar Rp 72.750,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan .
- 2 1049.005.004.052 : Dalam belanja Penetapan Hari Sidang sebesar Rp 10.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan .
- 3 1049.005.004.053 : Dalam belanja Pemeriksaan di Sidang Pengadilan sebesar Rp 82.000,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan ..
- 4 1049.005.005.054 : Dalam belanja Minutasi / Upaya Hukum sebesar Rp 12.080,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan .
- 5 1049.005.004.055 : Dalam belanja Pengiriman Petikan / Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa sebesar Rp 46.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.

- 6 1049.005.005.056 : Dalam belanja Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanangan Penahanan sebesar Rp 13.500,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
- 7 1049.005.006.057 : Dalam belanja Penanganan Banding di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 97.500,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
- 8 1049.005.006.058 : Dalam belanja Penanganan Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 83.500,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.

B. 1049.005.004 Perkara Tipikor yang diselesaikan di tingkat Pertama:

- 1. 1049.005.003.051 : Dalam belanja Pendaftaran Berkas Perkara sebesar Rp 49.000,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan .
- 2. 1049.005.004.052 : Dalam belanja Penetapan Hari Sidang sebesar Rp 20.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan .
- 3. 1049.005.004.053 : Dalam belanja Pemeriksaan di Sidang Pengadilan sebesar Rp 8.487,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan ..
- 4. 1049.005.005.054 : Dalam belanja Minutasi / Upaya Hukum sebesar Rp 46.220,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan .
- 5. 1049.005.004.055 : Dalam belanja Pengiriman Petikan / Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa sebesar Rp 70.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
- 6. 1049.005.005.056 : Dalam belanja Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanangan Penahanan sebesar Rp 78.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
- 7. 1049.005.006.057 : Dalam belanja Penanganan Banding di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 49.101,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
- 8. 1049.005.006.058 : Dalam belanja Penanganan Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 2.800,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.

C. 1049.005.004 Perkara PHI yang diselesaikan di tingkat Pertama:

- 1. 1049.005.004.051 : Dalam belanja Pendaftaran Berkas Perkara sebesar Rp 7.900,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan .
- 2. 1049.005.004.052 : Dalam belanja Penetapan Hari Sidang sebesar Rp 54.500,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan .

3. 1049.005.004.053 : Dalam belanja Pemeriksaan di Sidang Pengadilan sebesar Rp 30.000,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan ..
4. 1049.005.005.054 : Dalam belanja Minutasi / Upaya Hukum sebesar Rp 60.000,00 karena sudah tidak terdapat lagi berkas perkara yang akan digandakan / dijilidkan .
5. 1049.005.004.055 : Dalam belanja Pengiriman Petikan / Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa sebesar Rp 105.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
6. 1049.005.005.056 : Dalam belanja Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanangan Penahanan sebesar Rp 65.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.
7. 1049.005.006.057 : Dalam belanja Penanganan Banding di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 65.000,00 karena sisa pagu tidak mencukupi untuk direalisasikan.

D. 1049.006. Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta:

1. 1049.006.004.051 : Dalam belanja Biaya Perkara sebesar Rp 2.030.000,00 karena sudah tidak terdapat lagi perkara Prodeo yang diajukan sehingga tidak ada Belanja Bahan, Barang Persediaan Konsumsi maupun perjalanan dinas dalam kota yang direalisasikan.
2. 1049.006.004.052 : Dalam belanja Biaya Eksekusi sebesar Rp 650.000,00 karena tidak ada perkara eksekusi yang diajukan secara Prodeo.

**ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN (ABT)
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)**

NO	JENIS BELANJA	2019	2020	KENAIKAN
PAGU AWAL		PAGU 2019	PAGU 2020	KENAIKAN
1	DUKUNGAN MANAJEMEN	25.200.000	-	- 25.200.000
2	GAJI DAN TUNJANGAN	15.954.572.000	16.922.745.000	968.173.000
3	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	2.046.327.000	2.380.629.000	334.302.000
4	BELANJA MODAL	100.000.000	25.000.000	-75.000.000
	JUMLAH I	18.126.099.000	19.328.374.000	1.202.275.000

ABT		PAGU 2019	PAGU 2020	KENAIKAN
1	BELANJA MODAL--
2	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR--
3	NON OPERASIONAL--
	JUMLAH II

PAGU MINUS		PAGU 2019	PAGU 2020	KENAIKAN
1	GAJI DAN TUNJANGAN	18.639.211	180.502.899	161.863.688
	JUMLAH III	18.639.211	180.502.899	161.863.688
	TOTAL

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN (ABT)
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)**

NO	JENIS BELANJA	2019	2020	KENAIKAN
1	BELANJA BARANG-.....-.....
	ABT	ABT 2019	ABT 2020	KENAIKAN
1	BELANJA BARANG-.....-.....
	TOTAL

Untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) tidak terdapat alokasi ABT / Pengurangan Anggaran baik untuk tahun anggaran 2019 maupun tahun 2020.

Sedangkan DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) tidak terdapat alokasi ABT / Pengurangan Anggaran baik untuk tahun anggaran 2019 maupun tahun 2020.

**REKAPITULASI
LAPORAN REALISASI PENGELOLAAN PENDAPATAN PNB
TAHUN ANGGARAN 2019 DAN TAHUN ANGGARAN 2020
DIPA 01**

NO.	AKUN & URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		PENDAPATAN	
		ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	23.251.036	-	22.269.511	- 981.525	- 4,22
	JUMLAH	-	23.251.036	-	22.269.511	- 981.525	- 4,22

Penjelasan :

1. Akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp - 981.525 (- 4,22 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan belanja pegawai karena Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta jumlahnya berkurang di tahun 2020, sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan



**REKAPITULASI
LAPORAN REALISASI PENGELOLAAN PENDAPATAN PNB
TAHUN ANGGARAN 2019 DAN TAHUN ANGGARAN 2020
DIPA 03**

NO.	AKUN & URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		PENDAPATAN	
		ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	-	170.000	-	130.000	- 40.000	- 23,53
2	425232 Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan		6.412.000		6.490.000	78.000	1,22
3	425233 Pendapatan Ongkos Perkara		17.510.000		17.830.000	320.000	1,83
4	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		57.003.700		101.969.500	44.965.800	78,88
	JUMLAH	-	81.095.700	-	126.419.500	45.323.800	55,89

Penjelasan :

1. Akun 425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan

Terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp -40.000 (-23,53 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan belanja pegawai karena terjadi penurunan permintaan dikarenakan dapat melakukan pengunduhan (*download*) secara mandiri melalui sistem e-Court.

2. Akun 425232 Pendapatan Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan



Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 78.000 (1,22 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan belanja pegawai karena ada penurunan jumlah perkara di Tahun 2020

3. Akun 425233 Pendapatan Ongkos Perkara

Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 320.000 (1,83 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan belanja pegawai karena kenaikan jumlah perkara di Tahun 2020

4. Akun 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 44.965.800 (78,88 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan belanja pegawai karena kenaikan jumlah perkara di Tahun 2020.

2. LAPORAN KEUANGAN PERKARA

BIAYA PERDATA GUGATAN

REKAP 2020

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	668.422.847,84				Biaya lain lain terdiri dari biaya penggandaan dan surat menyurat,
Penerimaan		602.177.400,00			
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*)			36.150.000,00		
Biaya Panggilan			132.648.800,00		
Biaya Penerjemah			0,00		
Biaya Pemberitahuan			101.075.000,00		
Biaya Sita			0,00		
Biaya Pemeriksaan Setempat			14.878.000,00		
Biaya Sumpah			16.850.000,00		
Biaya Saksi Ahli			0,00		
Biaya Pengiriman			33.130.000,00		



Biaya Materai			1.764.000,00	
PNBP Biaya Pendaftaran			18.060.000,00	
PNBP Redaksi			2.940.000,00	
PNBP Lain-lain			20.001.000,00	
Pengembalian Sisa Panjar			282.425.300,00	
Biaya Lain-lain			22.821.500,00	
Saldo Akhir				587.856.647,84
Jumlah	668.422.847,84	602.177.400,00	682.743.600,00	587.856.647,84

BIAYA PROSES PERDATA

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	4.825.000,00				
Penerimaan		36.150.000,00			
Pengeluaran			33.358.200,00		
Saldo Akhir				7.616.800,00	
Jumlah	4.825.000,00	36.150.000,00	33.358.200,00	7.616.800,00	

BIAYA EKSEKUSI PERDATA

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	19.636.513.874,00				Biaya lain lain terdiri dari biaya penggandaan dan surat menyurat, pelaksanaan eksekusi, dan penyerahan hasil lelang
Penerimaan		748.186.500,00			
Biaya Materai			228.000,00		
Biaya Leges			0,00		
Biaya Sita Eksekusi			5.500.000,00		
Biaya Juru Sita			6.050.000,00		
Biaya Pengumuman Lelang/Iklan			19.500.000,00		
Biaya Juru Lelang			0,00		



Biaya Lelang			3.156.000,00	
Biaya Saksi			6.000.000,00	
Biaya Pemberitahuan			10.029.000,00	
Biaya Keamanan			0,00	
Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi			39.419.000,00	
PNBP			2.225.000,00	
Lain-lain			12.647.055.000,00	
Saldo Akhir				7.645.538.374,00
Jumlah	19.636.513.874,00	748.186.500,00	12.739.162.000,00	7.645.538.374,00

BIAYA KONSIGNASI

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	7.032.873.251,00				
Penerimaan (Uang Konsinyasi dan Panjar Konsinyasi)		1.296.000,00			
Biaya Pelaksanaan Penawaran			750.000,00		
Biaya pendaftaran			0,00		
Biaya Proses/ATK			0,00		
Redaksi			30.000,00		
Materai			18.000,00		
Leges			0,00		
Pengambilan Uang Konsinyasi			0,00		
Biaya Lain-lain			498.000,00		
Saldo Akhir				7.032.873.251,00	
Jumlah	7.032.873.251,00	1.296.000,00	1.296.000,00	7.032.873.251,00	

BIAYA PERDATA KHUSUS (PHI)



Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	3.860.000,00				
Penerimaan		12.522.000,00			
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*)			525.000,00		
Biaya Panggilan			3.260.000,00		
Biaya Penerjemah			0,00		
Biaya Pemberitahuan			2.180.000,00		
Biaya Sita			0,00		
Biaya Pemeriksaan Setempat			0,00		
Biaya Sumpah			300.000,00		
Biaya Saksi Ahli			0,00		
Biaya Pengiriman			249.000,00		
Biaya Materai			36.000,00		
PNBP Biaya Pendaftaran			730.000,00		
PNBP Redaksi			60.000,00		
PNBP Lain-lain			100.000,00		
Pengembalian Sisa Panjar			1.782.000,00		
Biaya Lain-lain			579.000,00		
Saldo Akhir				6.581.000,00	
Jumlah	3.860.000,00	12.522.000,00	9.801.000,00	6.581.000,00	

BIAYA EKSEKUSI PERDATA KHUSUS (PHI)

Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
Saldo Awal	4.296.000,00				
Penerimaan		2.300.000,00			
Biaya Materai			6.000,00		
Biaya Leges			0,00		
Biaya Sita Eksekusi			0,00		



Biaya Juru Sita			0,00	
Biaya Pengumuman Lelang/Iklan			0,00	
Biaya Juru Lelang			0,00	
Biaya Lelang			0,00	
Biaya Saksi			0,00	
Biaya Pemberitahuan			500.000,00	
Biaya Keamanan			0,00	
Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi			0,00	
PNBP			65.000,00	
Lain-lain			500.000,00	
Saldo Akhir				5.525.000,00
Jumlah	4.296.000,00	2.300.000,00	1.071.000,00	5.525.000,00

REKAP BIAYA PERKARA PERDATA

Uraian	Keadaan Keuangan					
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
Biaya Perkara	668.422.847,84	602.177.400,00	682.743.600,00	587.856.647,84		
Biaya Eksekusi	19.636.513.874,00	748.186.500,00	12.739.162.000,00	7.645.538.374,00		
Biaya Konsinyasi	7.032.873.251,00	0,00	0,00	7.032.873.251,00		
Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00		
PHI*)	8.156.000,00	14.822.000,00	10.872.000,00	12.106.000,00		
Jumlah	27.345.965.972,84	1.365.185.900,00	13.432.777.600,00	15.278.374.272,84	15.275.466.672,84	4.986.800,00



B. . PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

I. Sarana dan Prasarana Gedung.

Ada 2 (dua) gedung Kantor. Pertama Gedung Kantor Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta dibangun diatas tanah seluas 7385 m2, terdiri dari 2 (dua) lantai, dan gedung Tipikor di Jl Prof Dr Soepomo 12 Yogyakarta dengan rincian sarana dan prasara gedung dan fasilitas perkantoran sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan Gedung

Daftar Tanah dan Bangunan Gedung Tahun 2020

No	Satker	Luas Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Peruntukan	Pemegang Hak Atas Tanah
1	PN Yogyakarta	3.163	1.900	Gedung Tipikor dan PHI	Pemerintah RI Cq. MA RI
		7.385	3.610	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI

2. Rumah Negara

Daftar Rumah Negara Tahun 2020

No	Satker	Jumlah	Kondisi			Pemegang Hak Atas Tanah
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	PN Yogyakarta	19	7	12		Pemerintah RI Cq. MA RI

3. Kendaraan Dinas Roda 2

Daftar Kendaraan Roda 2 Tahun 2020

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	PN Yogyakarta	Honda	Supra 125	3	Baik
		Honda	HONDA GL. IIIISPORT	1	Baik
		Honda	HONDA SUPRA FIT X	1	Baik
		Honda	HONDA SUPRA FIT	4	Baik
		Honda	HONDA GP III MEGA PRO	2	Baik
		Honda	HONDA NF	1	Baik

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
			100 D		
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)				12	

4. Kendaraan Dinas Roda 4

Daftar Kendaraan Dinas Roda 4 Tahun 2020

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	PN Yogyakarta	Toyota	Altis	2	Baik
		Toyota	Vios	2	Baik
		Toyota	Innova G	1	Baik
		Toyota	Innova V	1	Baik
		Toyota	Kijang KF 40	1	Baik
		Toyota	Kijang LX	1	Baik
		Toyota	Avanza	1	Baik
Jumlah Kendaraan Roda 4 (Empat)				9	

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2020

No	Satker	Jenis Pengadaan
1	PN Yogyakarta	Tidak Ada

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2020

No	Satker	Jenis pemeliharaan	Keterangan
1	PN Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan sarana-prasarana untuk kaum Disabilitas dan Rentan 2. Pemeliharaan Ruang Arsip 3. Pemeliharaan Akses Security Sistem untuk hakim dan pegawai 4. Pemeliharaan Tangga Akses Hakim 5. Pemeliharaan Halaman 	

d. Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung

Tahun 2020 tidak ada Penghapusan Sarana Dan Prasarana Gedung.

Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2020

No	Satker	Tanggal	Jenis barang	Keterangan
1	PN Yogyakarta	-	-	-

II. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas penunjang. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas Gedung pada Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Pengadaan 2020	Jumlah 2020
1	Komputer	2	70
2	Laptop		51
3	Infokus/LCD		2
4	PABX		2
5	Mesin Ketik		10
6	Mesin Stensil		-
7	Mesin Fotokopi		1
8	AC		69
9	Faximile		5
10	Brankas		5
11	Sound system		6
12	Mesin Absensi		2
13	Tabung Pemadam Api		1
14	CCTV		5
15	UPS		4
16	Genset		2
17	Handy Cam		2
18	Pesawat telepon		2
19	Printer		42
20	Scanner		8
21	Server		3
22	Lemari Kayu		55
23	Lemari Besi		25
24	Filling Kabinet Kayu		-
25	Filling Kabinet Besi		19

No	Nama Barang	Pengadaan 2020	Jumlah 2020
26	Buffet		8
27	Rak		67
28	Meja Kerja Kayu		150
29	Kursi Kayu		54
30	Kursi Besi Metal		290
31	Sice		15
32	Bangku Panjang Kayu		60
33	Meja Rapat		3
34	Meja Komputer		8
35	Meja Resepsionis		4
36	Mesin Absensi sidik Jari		-
37	Kamera		2
38	Ht		4
39	Sekat		7
40	Meja Sidang		-
41	Kursi Hakim		-
42	Meja Telepon		3
43	Mesin Hitung		1
44	Kipas Angin		8
45	Televisi		18
46	RIG		-
47	Kulkas		2
48	External Hardisk		-
49	Hardisk		-
50	Anti Virus		-
51	Acces Point		9
52	Rak Server		1
53	Router		4
54	Air Curtain		0
54	Switch Hub 24 port		
55	Sumur		

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2020

No	Satker	Jenis Pemeliharaan	Keterangan
1	PN Yogyakarta	1. Pemeliharaan peralatan mesin : - Perawatan kendaraan dinas - Perawatan genset - Perawatan AC, PC, Printer, Fax, Fotokopi, soundsystem, proyektor, 2. Pemeliharaan jaringan : - Jaringan CCTV - Jaringan telpon - Jaringan internet.	

b. Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pada tahun 2020 tidak ada penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung.

Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2020

No	Satker	Tanggal	Jenis Barang	Keterangan
1	PN Yogyakarta	-	-	-

III. SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN PENCEGAHAN COVID 19

Disaat pandemi diperlukan tindakan yang cepat, tepat dan bijak. Instrumen-instrumen hukum dan peradilan haruslah tetap difungsikan namun dengan pertimbangan yang matang agar dapat ikut berperan dalam mengurangi dan memotong mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Mahkamah Agung telah dengan cepat merespon situasi pandemi ini dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 beserta perubahannya, SEMA Nomor 9 tahun 2020 yang merupakan perubahan SEMA 8 tahun 2020 serta SE SEKMA Nomor 8 tahun 2020 dan juga beberapa penyesuaian jam kerja melalui Work From Home dan Work From Office, penyesuaian anggaran bahkan penyesuaian dan terobosan dalam hukum acara telah pula dilakukan tandas Ketua MA RI. Adanya pandemi Covid-19 ini juga telah menjadi pemantik bagi Mahkamah Agung dalam menyusun payung hukum bagi proses persidangan secara elektronik atau e-Litigasi.

PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik telah dikembangkan untuk perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara serta tata usaha militer. Bahkan khusus untuk persidangan secara daring dalam perkara

pidana, pidana militer dan jinayat, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020.

Pengadilan Negeri Yogyakarta berharap bahwa berbagai terobosan ini tidak hanya respon sesaat di masa pandemi namun juga diletakkan sebagai bukti kesiapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi informasi dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi menjadi badan peradilan yang agung.

Rp. 57.000.000,00 dianggarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 yang meliputi pelaksanaan rapid test dan swab test secara berkala, melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin, pengadaan hand sanitizer, pengadaan multivitamin, pengadaan masker, sarung tangan, dan berbagai hal lain terkait Covid-19.

Dengan adanya situasi tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta juga menyesuaikan postur anggaran yang semula direncanakan akan digunakan untuk rakernas dialihkan kepada pencegahan pandemi Covid-19. Meskipun demikian

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Yogyakarta membuat kebijakan pencegahan penyebaran COVID terkait SDM :

- Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor : W13.U1/1741/KP.04.6/III/2020 tanggal 23 maret 2020 tentang Pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) pada Pegadilan Negeri Yogyakarta yang telah diperpanjang sampai dengan 4(empat) kali tanggal 23 Mei 2020.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor : W13.U1/4891/KP.04.6/IX/2020 tentang Pembentukan Satgas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogayakarta Kelas IA.

2. Sarana dan Prasarana, meliputi Sarana dan Prasarana Preventif dan Pembiayaan

Sarana dan prasarana preventif meliputi :

- Thermogun



- Washtafel



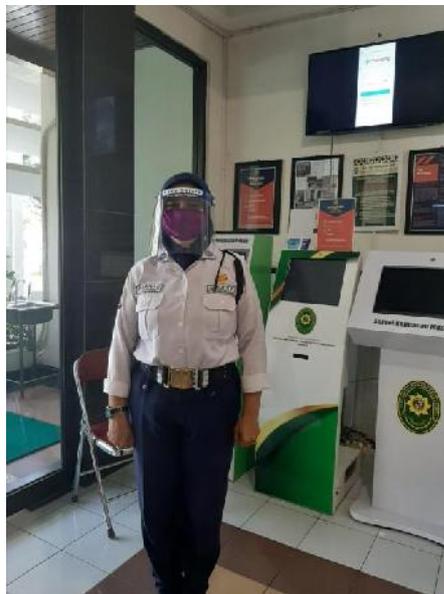
- Handsanitizer, ditempatkan disetiap ruang sidang dan pintu masuk gedung



- Droplet Protektor, ditempatkan disetiap area petugas PTSP, Ruang Sidang, Petugas Antrian sidang, petugas posbakum



- Masker
- Sarung Tangan
- Face shield



- Desinfektan



- Desinfektan Aerosol untuk berkas



- Multivitamin



- Rapid Test / Swabtest



- Sarana sidang online, Mediasi Online dan Rapat Online





Pembiayaan dengan dengan DIPA senilai Rp. 57.000.000,00

3. Tindakan Pencegahan

- Pembatasan Jam Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) selama masa pencegahan penyebaran corona virus Disease 2019 (Covid-19) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA

4. Penanganan saat Bencana

- Penunjukkan Petugas Operator Website Informasi Sebaran Covid-19 di Lingkungan Peradilan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA melakukan pembenahan Tehnologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki Sistem informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing - masing aplikasi dilakukan secara rutin. Sedangkan sarana dan prasaran IT :

a. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Manajemen administrasi perkara diinternal Pengadilan Negeri Yogyakarta dijalankan oleh seluruh kepaniteraan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA beserta Panitera Pengganti dengan dukungan dari bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan. Sampai saat ini Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah menerapkan SIPP versi 4.01 yang telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun Mahkamah Agung baik SIAP maupun Direktori Putusan MA. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang sebenarnya.

Dalam implementasi SIPP, diadakan pelatihan, evaluasi dan monitoring setiap minggu, yaitu pada hari senin untuk Panitera Pengganti, dan hari selasa untuk para Hakim. Tanggal 26 Oktober 2020 FGD dan sosialisasi SPPT, terkait keharusan kelengkapan penginputan data perkara.

Indikator kinerja, kepatuhan pemasukan (input) data, kelengkapan data dan validasi data adalah prasyarat mutlak dalam pengisian SIPP. Keempat indikator tersebut menjadikan implementasi SIPP tidak cukup sekedar mengejar warna hijau semata, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang tidak semestinya.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

STATISTIK PERKARA DAN REMINDER

Periode: Januari 2021

No	Perkara	Salah Saja	Masuk	Puluhan	Ratusan	Salib	Bandung	Korupsi	Pembunuhan	Ekstrem	Gras
1	Perampasan	71	3	7	45	—	—	—	—	—	—
2	Pembunuhan	14	3	7	143.000 %	14	—	—	—	—	—
3	Kepolisian	—	—	—	0.00 %	—	—	—	—	—	—
4	Perampasan (Korupsi)	—	—	—	0.00 %	—	—	—	—	—	—
5	Perampasan (Korupsi)	—	—	—	0.00 %	—	—	—	—	—	—
6	Perampasan (Korupsi)	—	—	—	0.00 %	—	—	—	—	—	—
7	Perampasan (Korupsi)	—	—	—	0.00 %	—	—	—	—	—	—
8	Perampasan (Korupsi)	—	—	—	0.00 %	—	—	—	—	—	—
9	Perampasan (Korupsi)	—	—	—	0.00 %	—	—	—	—	—	—
10	Perampasan (Korupsi)	42	0	11	137.00 %	37	—	—	—	—	—
11	Perampasan (Korupsi)	—	—	—	0.00 %	—	—	—	—	—	—
12	Perampasan (Korupsi)	—	3	3	103.00 %	—	—	—	—	—	—
13	Perampasan (Korupsi)	—	59	89	103.00 %	—	—	—	—	—	—
14	Perampasan (Korupsi)	—	—	—	0.00 %	—	—	—	—	—	—
15	Perampasan (Korupsi)	2	2	—	0.00 %	2	—	—	—	—	—
16	Perampasan (Korupsi)	—	—	—	0.00 %	—	—	—	—	—	—

Adapun link SIPP untuk masyarakat umum dan pencari keadilan dapat diakses di :

<http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/>

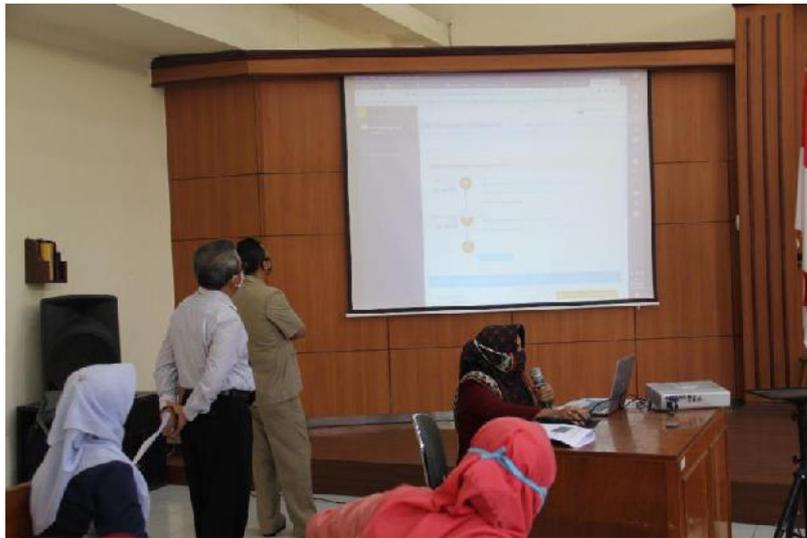
2. e-COURT Mahkamah Agung RI

Sehubungan dengan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2020 tentang Administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, bersama ini kami laporkan sebagai berikut :

a. Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan rapat dan sosialisasi dengan para hakim, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti dan Peradi mengenai Perma tersebut yaitu :

- Tanggal 13 Mei 2020 FGD dan sosialisasi tanda tangan elektronik dengan Hakim, verifikasi salinan putusan





- Tanggal 10 Juli 2020 FGD dan sosialisasi tanda tangan elektronik dengan Panitera Penggati



b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan E-Court, telah disiapkan **corner E Court** untuk mendaftar perkara secara elektronik dengan disediakan ruangan sendiri dengan perlengkapannya.



3. Website Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA

Website Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dapat diakses di: <http://pn-yogyakarta.go.id>

Website tersebut berisi profil, transparansi laporan, kegiatan, berita pengadilan, persyaratan, info perkara, putusan dan pengumuman Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI untuk Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dapat diakses di:

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta>

Direktori Putusan merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengupload perkara yang menempuh upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun setelah implementasi SIPP versi 3.2.0, data putusan merupakan hasil sinkronisasi dari SIPP pengadilan.



5. Aplikasi Eraterang

ERATERANG atau elektronik surat keterangan merupakan produk aplikasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Eraterang sebagai media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan

Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP/ Gawai dan Komputer/ PC).



Jenis Surat Keterangan yang bisa dilayani melalui aplikasi Eraterang :

- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
- Surat Keterangan di Pidana karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik;
- Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

Langkah-langkah Mengajukan Surat Keterangan Elektronik Melalui Aplikasi Eraterang

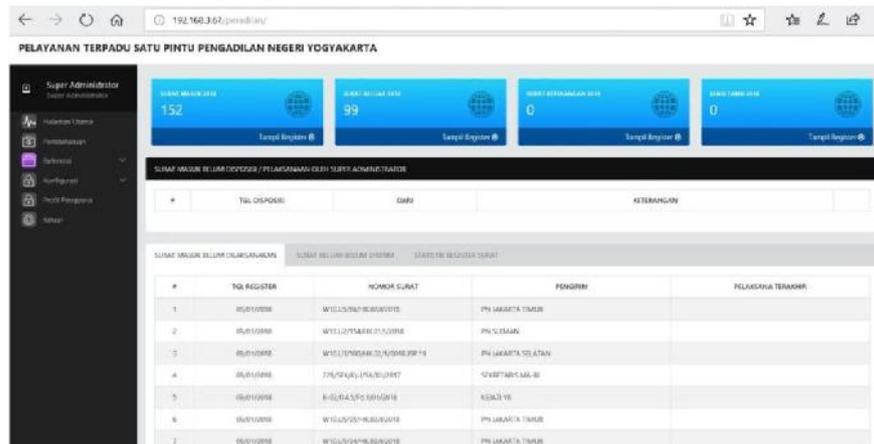


6. Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebuah instrumen Pengadilan Negeri sebagai bentuk kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kegiatan pendaftaran surat masuk dan keluar, buku tamu, permohonan surat keterangan, permohonan penyitaan dan pengeledahan. Dimana staf pengadilan akan menghemat waktu dalam melakukan pembuatan dokumen atau

pemberian informasi kepada masyarakat. Adapun ruang lingkup aplikasi PTSP :Register Surat

- Register Surat Keterangan
- Register Buku Tamu
- Register Penyitaan
- Register Pengeledahan



7. Aplikasi Antrian Sidang

Antrian Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah layanan kepada Pencari Keadilan dimana Para Pihak yang berperkara akan dipanggil dan disebut nama pihak untuk memasuki ruang sidang dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi Absensi Pihak (Roll Sidang) di Meja Informasi dan Terkoneksi dengan data perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi ini berdasarkan kedatangan dan kelengkapan para pihak, yaitu dengan cara para pihak melaporkan kedatangan ke meja informasi. Para pihak yang sudah lengkap akan disidangkan terlebih dahulu, disamping itu masyarakat dapat mengetahui persidangan suatu perkara berkaitan dengan ruang sidang, status persidangan atau sudah selesai sidang.

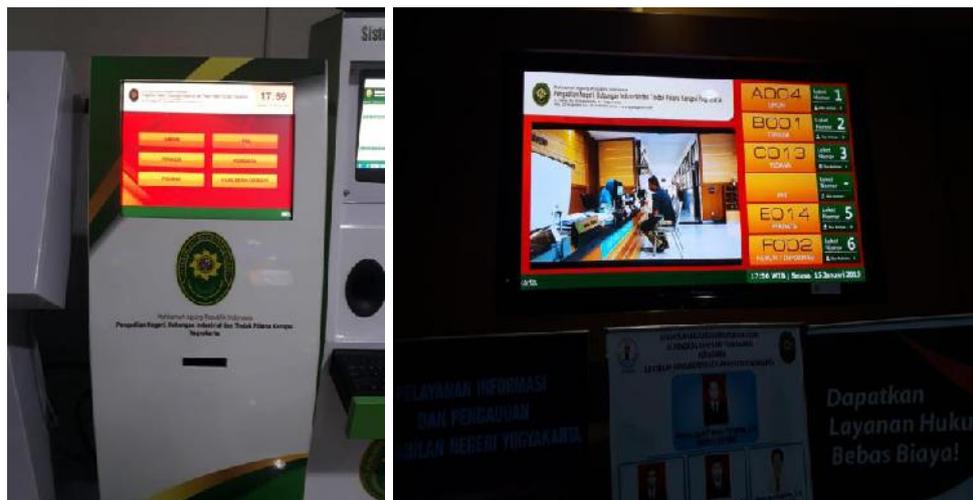
Pemanggilan Pihak dapat dilakukan dengan menggunakan Personal Komputer, Laptop atau Handphone Android.

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan adanya peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta.



8. Aplikasi Antrian Pelayanan / PTSP

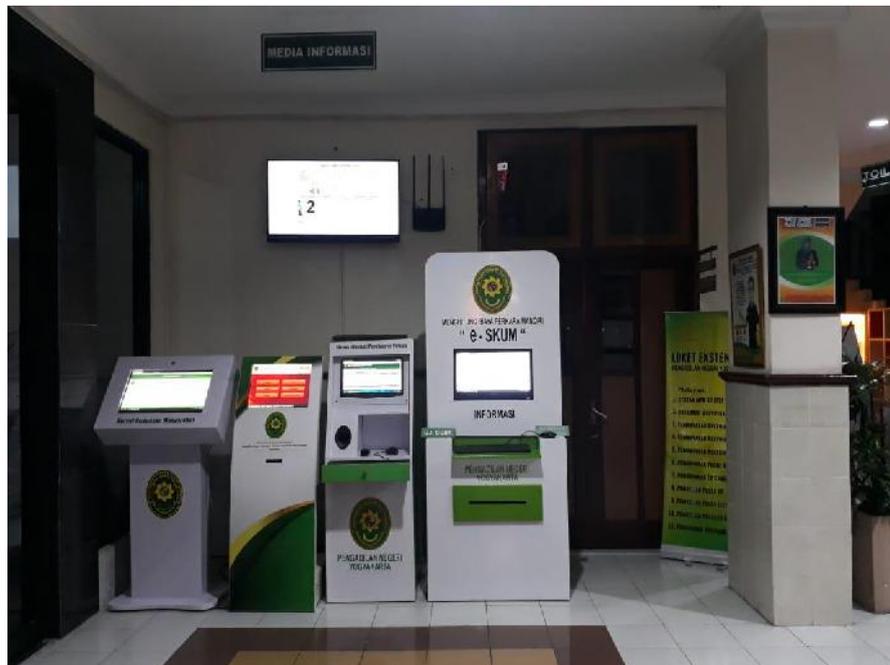
Antrian Pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah layanan kepada Pencari Keadilan dimana pencari keadilan akan dipanggil sesuai dengan nomor urut antrian dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi di Meja PTSP dan dan Media Informasi.



9. Aplikasi ESKUM

e-SKUM adalah Sistem Aplikasi Menghitung Sendiri Panjar Biaya Perkara yang dilakukan oleh Para Pencari Keadilan di Loby Utama dengan menggunakan alat e-SKUM.

Maksud dan Tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKUM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.



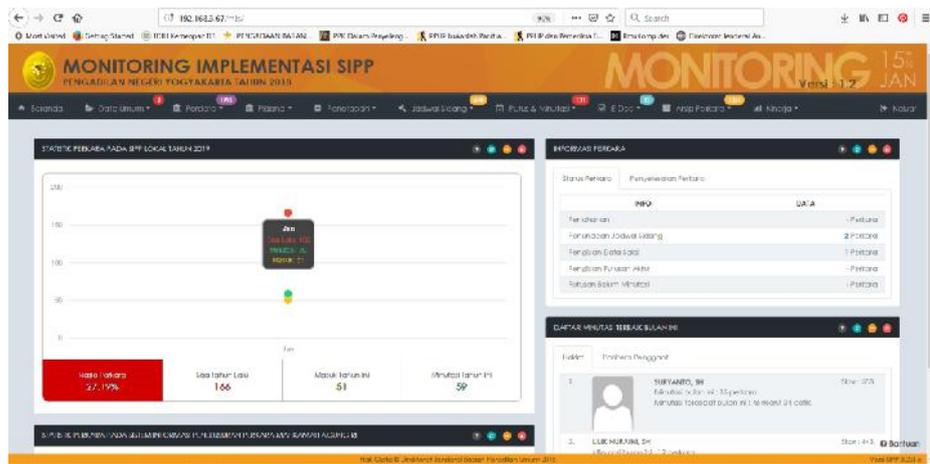
10. Aplikasi ATR

Aplikasi Transkrip Persidangan (ATP) adalah sebuah inovasi aplikasi peradilan yang dibuat untuk merubah proses administratif peradilan dari konvensional menjadi berbasis teknologi informasi. Aplikasi ini digunakan untuk merekam suara pembicara dalam proses persidangan yang kemudian dikonversi dalam bentuk text didalam komputer dan dikemas menjadi sebuah transkrip persidangan.



11. Aplikasi Monitoring SIPP

Aplikasi Monitoring adalah sebuah aplikasi turunan dari SIPP yang digunakan untuk memonitoring dan evaluasi implementasi SIPP di pengadilan. Fitur-fitur aplikasi monitoring cukup membantu dalam evaluasi dan pengawasan internal, namun sangat perlu dikembangkan lagi sesuai kebutuhan terhadap informasi pengawasan SIPP.



12. SMS gateway Mahkamah Agung

Merupakan aplikasi laporan keadaan perkara, laporan bantuan hukum dan pos bantuan hukum. Yang bertanggung jawab terhadap isi data: Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan PHI dan Kepaniteraan Tipikor. Aplikasi tersebut dapat diakses di : <http://sms.mahkamahagung.go.id/index.php/main/index/1>

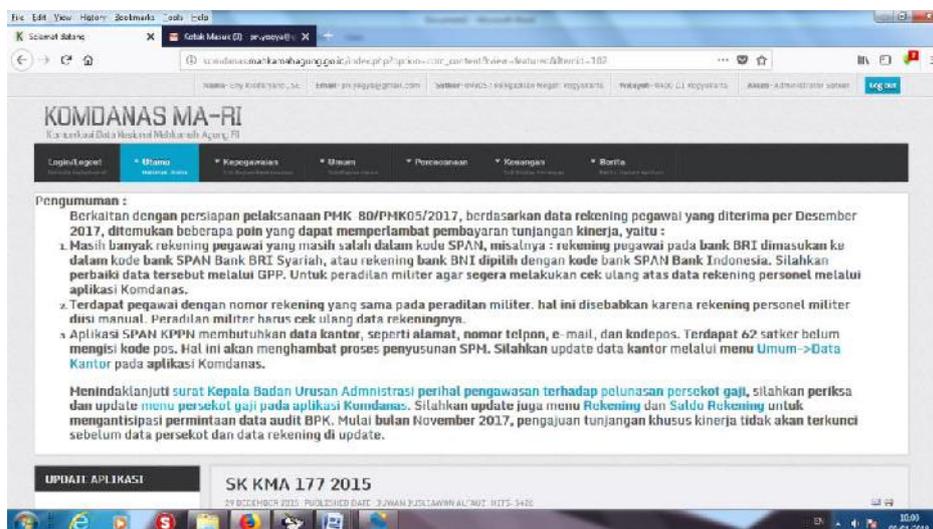
13. Audio Visual Perekam Sidang Tipikor

Software perekam persidangan yang dapat digunakan mereview jalannya persidangan tipikor.

14. KOMDANAS

Merupakan aplikasi laporan kegiatan dan komunikasi data nasional bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum, Perencanaan, IT dan Pelaporan serta Kepaniteraan Perdata yang terintegrasi.

Aplikasi tersebut dapat diakses di <http://komdanas.mahkamahagung.go.id>



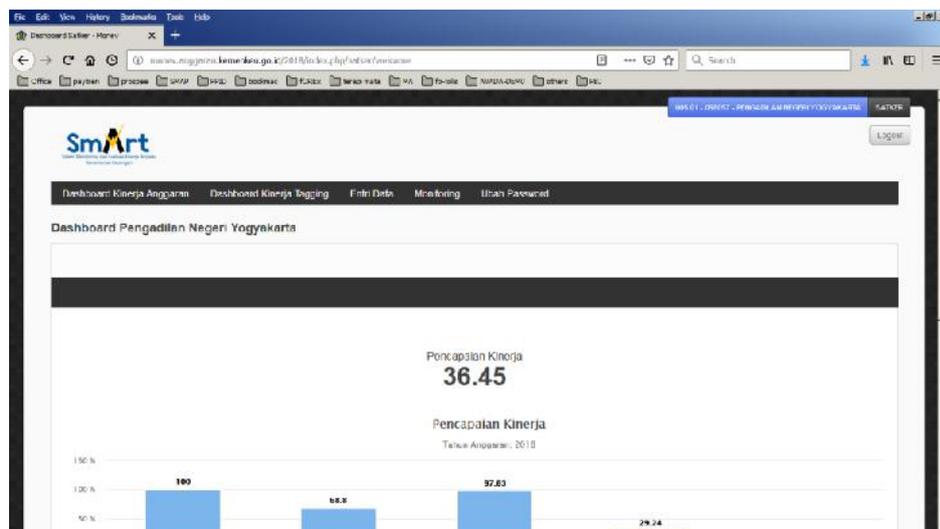
15. Aplikasi SIKEP dan aplikasi kepegawaian dari BKN

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI.



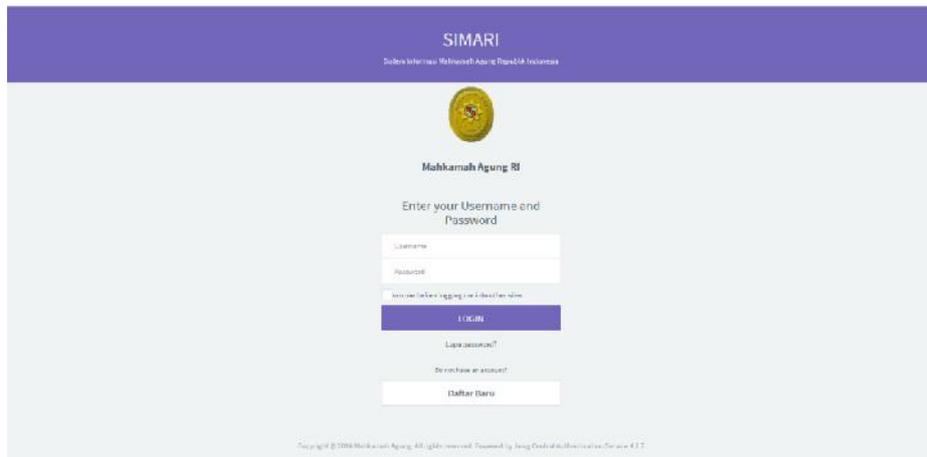
16. SMART

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.



17. SIMARI

System Informasi Mahkamah Agung RI yang terintegrasi, baik dari system informasi perkara, system informasi keuangan dsb.



18. SIMPONI

System informasi penerimaan negara bukan pajak secara on line.



19. OMSPAN

Aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam system perbendaharaan dan anggaran Negara (SPAN) yang menyajikan informasi sesuai kebutuhan / reporting.

No.	Nomor SP2D	Tanggal Saldo SP2D	Tanggal SP2D	NIBAI SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cat. Detail Akun	Data SP2D (Pilih)
1	17050170-005196	04-01-2018	31-12-2017	0	001817409807/2017	31-12-2017	STUP NIBI	ABNWA	Pemanggungan Tambahan Uang Persewaan Untuk Kepentingan Pelajar Mudi sebagai Tenggahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 20140 tanggal 23-12-2017	Cat. Akun	
2	1705014000005056	04-01-2018	31-12-2017	0	00281409809/2017	31-12-2017	SIUP NIBI	LAINWA	Pemanggungan Tambahan Uang Persewaan Untuk Kepentingan Pelajar Barang sebagai Tenggahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 20140 tanggal 23-12-2017	Cat. Akun	
3	1705014000005057	01-01-2018	31-12-2017	0	00281409809/2017	31-12-2017	SIUP NIBI	LAINWA	Pemanggungan Tambahan Uang Persewaan Untuk Kepentingan Pelajar Barang sebagai Tenggahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 20140 tanggal 23-12-2017	Cat. Akun	
4	17050170-005187	04-01-2018	31-12-2017	0	001817409807/2017	31-12-2017	STUP NIBI	ABNWA	Pemanggungan Tambahan Uang Persewaan Untuk Kepentingan Pelajar Barang sebagai Tenggahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 20140 tanggal 23-12-2017	Cat. Akun	

20. MONEV

Aplikasi yang digunakan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja satker.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adapun program-program yang telah dilaksanakan antara lain:

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan berbagai upaya demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE).

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus Pelanggan (customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system); 5) Manajemen Sumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results).

Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2016 mendapatkan nilai A (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.007/QMR/SERTIFIKAT/09/2016

Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan 29 Agustus 2020 dengan rencana audit surveillance pada :

Bulan Februari Tahun 2017

Bulan Agustus Tahun 2017

Bulan Februari Tahun 2018

Bulan Agustus Tahun 2018

Bulan Februari Tahun 2019

Bulan Agustus Tahun 2020



Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum

Pada Tanggal 15 Maret 2020, Tim Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum melakukan assesmen di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan hasil nilai 702 point,

sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1574/DJU/SK/OT.01.3/7/2020

B. REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (aparatur).

Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA mengimplementasikan program Reformasi Birokrasi dan telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2018 yang telah di Asesor oleh Tim Reformasi dari Mahkamah Agung RI dengan Capaian **85,12** (Delapan Puluh lima Koma Dua Belas) dengan nilai yang sangat baik.

C. ZONA INTEGRITAS

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi yaitu (1) Birokrasi yang Bersih dari KKN dan Akuntabel, (2) Birokrasi yang Efektif dan Efisien, (3) Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan salah satu *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut.

Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai **komitmen** untuk mewujudkan **WBK/WBBM** melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam **hal pencegahan korupsi** dan **peningkatan kualitas pelayanan publik**.

Pengadilan Negeri Yogyakarta membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik. Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta berkesempatan untuk mendapatkan predikat WBK. Sedangkan pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Yogyakarta belum berkesempatan untuk mendapatkan predikat WBBM, namun demikian, tidak berhenti disini, pembangunan dan pemeliharaan Zona Integritas menuju WBBM tetap kami lanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

D. PILOT PROJECT RAMAH KAUM RENTAN / DISABILITAS

Penerapan pengadilan inklusif, yaitu layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan :

Menjamin kehormatan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas / kaum rentan yang berhadapan hukum



- ✓ Merupakan pilot project dari Kemenpan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Disabilitas sesuai dengan Surat Sekma No. 476/SEK/OT.01.1/3/2020 dan Surat Debuti Pelayanan Publik Nomor B/47/PP.05/2020 11 dari 910 pengadilan se Indonesia
- ✓ Menjalin kerjasama MoU dengan pihak SADPA dalam rangka pendampingan disabilitas berhadapan hukum di dalam maupun di luar pengadilan dengan memberikan pendampingan psikososial dan proses pemulihan.

- ✓ Menjalin kerjasama dengan Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta dengan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang berhadapan hukum.
- ✓ Menjalin Kerjasama dengan LSM Rifka Annisa berupa pendampingan psikososial dan atau bimbingan konseling terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum

Milestone Program Pengadilan Negeri Yogyakarta

Menuju Pelayanan Pengadilan Inklusif



LANGKAH-LANGKAH YANG SUDAH DIAMBIL :

- ✓ Memberikan sosialisasi kepada para Hakim, Pegawai dan seluruh jajaran untuk dapat merubah **mindset** bahwa dalam pelayanan dan penanganan perempuan dan anak penyandang disabilitas harus didasarkan pada dasar hak asasi (**right based**) bukan atas dasar kasihan (**charity based**).
- ✓ Merubah perspektif bahwa penyandang difabel bukan lagi orang yang tidak dapat melakukan sesuatu seperti orang normal lainnya, melainkan orang yang dapat melakukan sesuatu dengan **kemampuan yang berbeda**.
- ✓ Sosialisasi kepada hakim dan pegawai mengenai pedoman mengadili perkara perempuan dan anak penyandang disabilitas.

- ✓ Memberikan sarana-prasarana yang akses dan ramah terhadap penyandang disabilitas.
- ✓ Mengidentifikasi adanya perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
- ✓ Perlakuan yang sama dalam system peradilan.
- ✓ Mengupayakan dan mengakomodasi keterangan penyandang difabel (tuna rungu) dengan menyediakan penerjemah tuna rungu

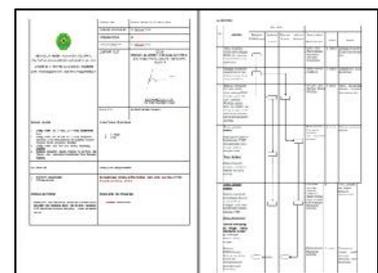
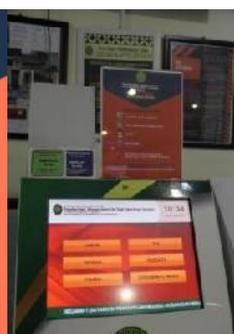
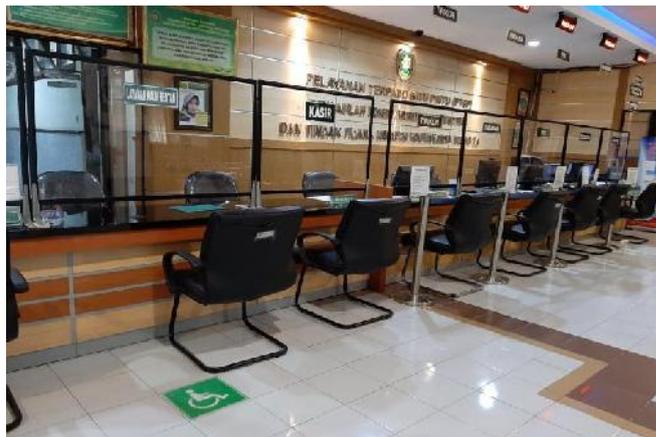
Kecamatan Subdistrict	Tunggal	Ganda	Multi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mantrijeron	200	11	0	211
Kraton	213	9	1	223
Mergangsan	132	8	1	141
Umbulharjo	522	31	2	555
Kotagede	266	10	1	277
Gondokusuman	275	2	0	277
Danurejan	123	23	2	148
Pakualaman	100	19	1	120
Gondomanan	226	6	0	232
Ngampilan	109	10	4	123
Wirobrajan	279	19	2	300
Gedongtengen	239	2	1	242
Jetis	300	21	2	323
Tegalrejo	291	12	2	305
Jumlah/Total	3275	183	19	3477

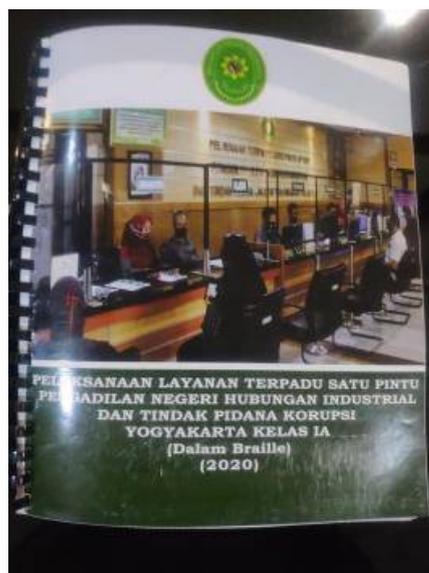
Catatan/Note : Pendataan dilakukan 2 (dua) tahun sekali.
 Sumber: Dinas Sosial Kota Yogyakarta
 Source: The Social Welfare Services of Yogyakarta Municipality

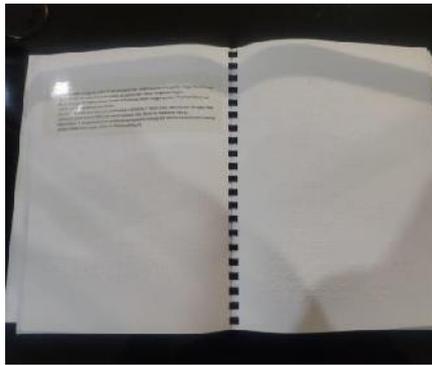
SARANA – PRASARANA

- ✓ Desk Pelayanan PTSP yang dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas.
- ✓ Form disabilitas Pelayanan PTSP untuk pengguna layanan, sehingga dapat diketahui sejak awal kebutuhan alat bantu dan perlakuan apa yang harus diterapkan
- ✓ Posisi prioritas untuk penyandang disabilitas di persidangan
- ✓ Priority Seat yang dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas.
- ✓ Kursi Roda dan Tongkat di lobby PTSP / Drop In Gedung
- ✓ Toilet Khusus dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas.
- ✓ Jalur akses masuk ke gedung dapat diakses dan dijangkau penyandang disabilitas
- ✓ Video / audio visual untuk sosialisasi yang diterjemahkan dengan bahasa isyarat
- ✓ Situs Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri
- ✓ SOP Penanganan Difabel

- ✓ **Sosialisasi** Penanganan Hukum Yang Ramah Dan Akses Bagi Perempuan Dan Anak Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Oktober 2020
- ✓ **Konsultasi dan Pengumpulan Data** dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan tanggal 17 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh utusan Debuti Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Sekretariat Negara RI









E. EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Yogyakarta belum mendapat kesempatan untuk menjadi satker uji petik terhadap Evaluasi Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Namun demikian, Pengadilan Negeri Yogyakarta berusaha untuk tetap melakukan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, untuk menjamin terwujudnya harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, berdasarkan amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Kementerian PAN RB melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Keenam aspek tersebut meliputi: Kebijakan pelayanan publik, Profesionalisme sumber daya manusia, Sarana dan prasarana, Sistem informasi pelayanan publik, Mekanisme konsultasi dan pengaduan, Inovasi pelayanan publik.

Indikator penilaian diperoleh dari persilangan antara aspek dan enam prinsip dalam melakukan evaluasi: Keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdayaguna, dan aksesibilitas.

Pada aspek kebijakan pelayanan, penilaian akan melihat pada standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat. “Standar pelayanan yang disusun harus melibatkan masyarakat dan dipublikasikan.

F. POSBAKUM

Pos bantuan hukum adalah layanan yang dibentuk oleh setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Pos Layanan Hukum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Anggaran Posbakum Pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tertuang dalam DIPA No.005.03.099128/2020.

Dalam tahun 2020, alokasi anggaran yang tersedia sejumlah Rp. 48.000.000,00 dan telah terealisasi Rp. 48.000.000,00 terdapat 526 kegiatan dengan jenis pelayanan advice, konsultasi, pembuatan dokumen hukum.

Pelayanan dari Posbakum adalah sebagai berikut:

- a. Melayani konsultasi hukum baik perkara pidana maupun perdata
- b. Membantu pembuatan dokumen hukum
- c. Memberikan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Negeri
- d. Memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri Masyarakat tidak mampu secara ekonomi hanya perlu menyiapkan salah satu dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu
 - b. Jamkesmas/KKM/Kartu Raskin/PKH
 - c. Dokumen lain yang terkait dengan keterangan tidak mampu.



G. INOVASI & KREATIVITAS PELAYANAN

A. INOVASI PROSES

1. PERUBAHAN DARI PELAYANAN SATU ATAP MENJADI PELAYANAN SATU PINTU

Untuk meningkatkan pelayanan yang prima, Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas I A telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatukan pelayanan yang tersebar di beberapa kepaniteraan disatukan dalam satu pintu dan satu tempat mulai dari proses permohonan /pelimpahan perkara sampai terbitnya dokumen /selesaiannya proses (ONE STOP SERVICE). Pelayanan dilaksanakan dalam satu meja pelayanan baik itu untuk pelayanan teknis perkara maupun pelayanan umum. Wujud keseriusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PTSP merupakan salah satu program dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik.

Jenis-jenis pelayanan :

Pelayanan Kepaniteraan Pidana

Pelayanan Kepaniteraan Perdata

Pelayanan Kepaniteraan Hukum

Pelayanan Surat Masuk (Bagian Umum)

Pelayanan Kepaniteraan PHI

Pelayanan Kepaniteraan Tipikor

Untuk mendukung terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah menerapkan aplikasi PTSP dari Dirjen Badilum, E-Skum, Kios-K SIPP, Antrian Sidang Elektronik, Antrian PTSP, Aplikasi IKM serta media informasi dan sosialisasi.

✓ Reformasi Regulasi :

Menyatukan pelayanan yang tersebar di beberapa kepaniteraan disatukan dalam satu pintu dan satu tempat mulai dari proses permohonan /pelimpahan perkara sampai terbitnya dokumen /selesaiannya proses (ONE STOP SERVICE)

✓ Reformasi Birokrasi :

Penyederhanaan prosedur pelayanan yang lebih efisien, efektif, murah, transparan, akuntabel, menghindari biaya tinggi (penghematan) dan penyelewengan.

- ✓ Reformasi Birokrasi -> Pelayanan Publik yang Prima
- ✓ Amanat Peraturan Perundang-undangan
- ✓ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program Dirjen Badan Peradilan Umum dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai good governance/keperintahan yang baik.



2. PEMBENAHAN RUANGAN MENJADI LEBIH TRANSPARAN NAMUN STERIL

Pemisahan ruang pelayanan administrasi (PTSP) dan ruang pelayanan persidangan, dimana telah disediakan ruang tunggu masing-masing sesuai dengan jenis layanannya.

Pengunjung sudah tidak bisa masuk ke ruangan masing-masing.





3. SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Implementasi SNI ISO 37001 : 2016 telah dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penetapan Inpres No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang diikuti dengan adopsi ISO 37001 : 2016 menjadi SNI ISO 37001 : 2016 melalui Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional No.248/KEP/BSN/11/2016 pada bulan November 2016. SNI ISO 37001 dirancang bagi organisasi untuk menaati peraturan perundang-undangan serta memiliki kemampuan untuk mencegah (*prevent*), mendeteksi (*detect*), dan menangani (*respond*) terjadinya tindak pidana suap dengan berdasar pada 6 prinsip yaitu prosedur yang proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji kelayakan (*due diligence*), komunikasi yang efektif, serta monitoring dan review/evaluasi. Penerapan keenam prinsip tersebut dilakukan dalam sebuah proses yang disebut PDCA yaitu *Plan, Do, Check, dan Act*.

SMAP mendasarkan pada 44 klausul yang menjadi kriteria SMAP yang mana dalam penerapannya di Pengadilan Negeri hanya dilakukan pada 43 klausul karena 1 klausul yaitu adanya organ lain di bawah Pengadilan Negeri tidak diterapkan dalam penilaian.

Pada tahapan penerapan SNI ISO 37001 dilakukan persiapan yang meliputi training dan gap analysis, pengembangan sistem yang meliputi pengembangan kebijakan dan pengembangan dokumentasi, implementasi yang meliputi sosialisasi dan implementasi sistem, review sistem yang meliputi audit internal, tinjauan manajemen, dan persiapan sertifikasi, serta Sertifikasi yang meliputi pemilihan lembaga sertifikasi, pelaksanaan audit, perbaikan hasil audit, dan keputusan sertifikasi. Pengadilan negeri yang diajukan sebagai *pilot project* saat itu diminta untuk melakukan *bribery assesment* terhadap titik-titik rawan suap serta membuat program kerja untuk mengawasi titik-titik rawan suap tersebut. Dalam penerapannya, sistem yang telah ada dalam rangka melakukan pencegahan, pendeteksian, dan penindakan atas perilaku suap disinergikan dalam rangka pengendalian suap dan gratifikasi serta penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Terhadap sistem yang telah terbangun dan mendapatkan akreditasi maka akan dilakukan *surveillance* pada setiap 1 tahun dan jika ditemukan pelanggaran maka sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 bisa dicabut.

5. KERJASAMA PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DENGAN DINAS PMPPA (PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)

- ✓ Kerjasama penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak berhadapan hukum.
- ✓ Mou antara Pemkot Yogyakarta, Peradi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 29 Maret 2018.
- ✓ Pengadilan Negeri Yogyakarta mendukung terwujudnya Yogyakarta menjadi Kota Layak Anak.
- ✓ Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempersiapkan sejumlah prasarana yang disiapkan seperti ruang sidang anak, ruang tahanan ramah anak, ruang anak tidak ditahan, ruang untuk anak sebagai korban, ruang tahanan untuk perempuan, ruang teleconference, ruang tunggu Bapas/Peksos, Pojok Baca, Klinik Kesehatan, Ruang Pengasuhan Anak dan lain-lain.

- ✓ Pemkot Yogyakarta memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang berhadapan hukum di Kota Yogyakarta.

6. KERJASAMA PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DENGAN LSM RIFKA ANNISA

- ✓ Kerjasama Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan LSM Rifka Annisa tertanggal 13 Maret 2018.
- ✓ Pendampingan psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.
- ✓ Pendampingan psikososial dan atau bimbingan konseling terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum
- ✓ Pemberian layanan konseling laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari upaya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis Gender.

7. PENANDATANGANAN MOU PENANGANAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KEPADA PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- Kerjasama Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan LSM SAPDA sejak 12 Juli 2018.
- Pendampingan psikososial dan proses pemulihan perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- Asistensi dan dukungan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjadi pengadilan yang aksesibel terhadap kaum disabilitas
- Peningkatan sarana prasarana untuk kaum disabilitas.

8. PENANDATANGANAN MOU PENYULUHAN HUKUM MELALUI RADIO (ON-AIR)

- ✓ Kerjasama dengan Radio Retjo Buntung dalam penyuluhan hukum sejak 1 Agustus 2018
- ✓ Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat Kota Yogyakarta untuk memperoleh informasi masalah hukum dengan memberikan penyuluhan hukum melalui siaran radio.
- ✓ Kesepakatan bersama ini bermaksud untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk taat dan sadar kepada hukum yang berlaku di Indonesia serta

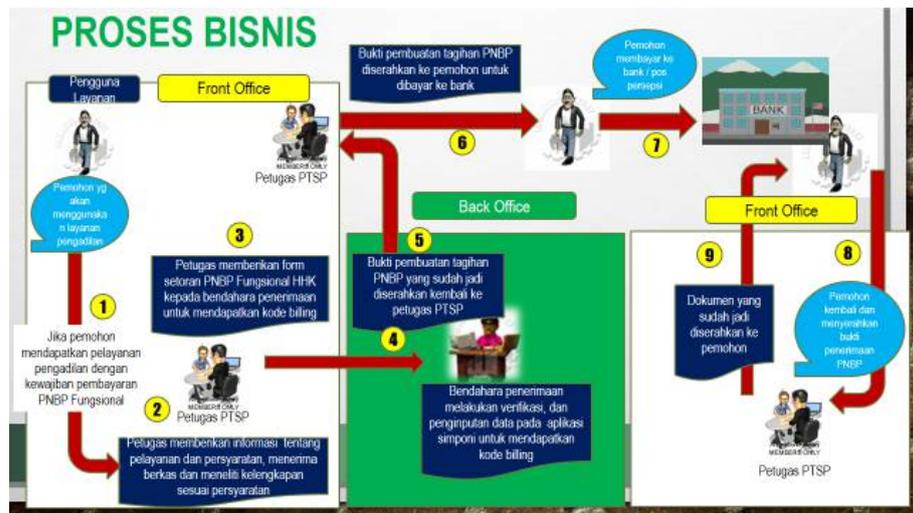
sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dibidang hukum.

- ✓ Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dibidang hukum, Pengadilan Negeri Yogyakarta menyediakan narasumber untuk memberikan penyuluhan di bidang hukum.
- ✓ Pihak Radio Retjo Buntung memberikan waktu jam siaran secara langsung (on air) dengan durasi 1 (satu) jam setiap hari Kamis ke-1 pukul 09.00-10.00 WIB, serta akan dipertimbangkan untuk melakukan siaran satu bulan lebih dari satu kali dengan melihat situasi dan kondisi.



9. PEMBAYARAN PNBP FUNGSIONAL KERJA SAMA DENGAN PT POS INDONESIA

- Kerjasama dalam penerimaan layanan PNBP Fungsional pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak 1 Agustus 2018
- Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran PNBP Fungsional serta demi terciptanya tertib administrasi pengelolaan PNBP Fungsional yang efektif dan efisien pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Kesepakatan bersama ini ditujukan dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi terkait pengelolaan PNBP yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Pihak PT. Pos Indonesia memberikan dukungan dengan menempatkan pegawainya dan sarana yang diperlukan untuk memenuhi penerimaan PNBP Fungsional di kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta



BENTUK KERJASAMA LAIN DENGAN KANTOR POS :

- ✓ **Nazegelen**, pematereian barang bukti, yang selama ini dilakukan di Kantor Pos Besar. Hal itu sangat memudahkan dan memepercepat para pihak dalam pelayanan.
- ✓ Pengiriman Wesel Delegasi Keluar, dimana sangat membantu sekali pihak koordinator delegasi dan JSP dalam mengurangi kegiatan keluar kantor.
- ✓ Mempercepat pengiriman surat keluar dan mengurangi korupsi waktu petugas kurir.

10. KERJASAMA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA

- Sebagai landasan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kota Yogyakarta .
- Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya para pihak dalam meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap hukum.
- Mou antara Pemkot Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 6 September 2018.
- Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama di bidang hukum, integrasi data dan pelayanan terpadu.
- Kerjasama ini merupakan dasar untuk dijadikan sebagai dasar hukum untuk perjanjian kerjasama dengan SKPD dilingkungan Pemkot Yogyakarta.

11. KERJASAMA PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU IDENTITAS HUKUM BAGI MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA.

- Kesepakatan ini bermaksud untuk meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerjasama para pihak dalam pelayanan kepemilikan status hukum, kepemilikan hukum bagi masyarakat kota yogyakarta. Kesepakatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh status hukum dan identitas hukum secara mudah, cepat dan biaya ringan. Memudahkan masyarakat dalam memenuhi identitas hukum dalam melakukan perbuatan hukum di masyarakat dengan pelaksanaan pelayanan terpadu. Untuk mensinergikan program peran masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan status hukum dan identitas hukum bagi masyarakat kota yogyakarta. Memudahkan pelaporan data perkara yang diputuskan / ditetapkan oleh pengadilan Negeri Yogyakarta ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta secara cepat dan akurat setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 25 Oktober 2018.

12. KERJASAMA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (SPPT)

- Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Rumah Tahanan Klas II Yogyakarta.

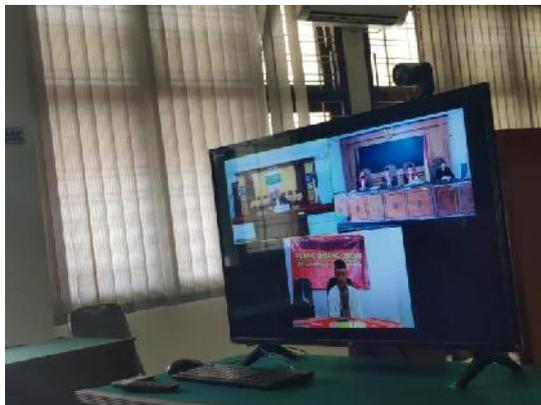
- Maksud dan tujuan kerjasama tersebut adalah :
 - Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia para pihak dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - Optimalisasi fungsi koordinasi antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Rumah Tahanan Klas II Yogyakarta
 - Menciptakan sistem peradilan pidana terpadu dalam memanfaatkan teknologi.
 - Mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang berlaku.
- Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi kegiatan penyuluhan hukum, kerjasama di bidang hukum, pelayanan sidang terpadu dan sistem peradilan pidana terpadu agar masyarakat taat terhadap hukum yang berlaku.

13. PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- ✓ Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dewan Pimpinan Cabang Kota Yogyakarta ditandatangani tanggal 29 Maret 2018
- ✓ Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama para pihak dalam melaksanakan program kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- ✓ Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama para pihak dalam penyelenggaraan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.
- ✓ Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama di bidang hukum, sosialisasi, pendidikan hukum dan pemberian bantuan hukum pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

14. KESEPAKATAN KERJASAMA KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA, KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B YOGYAKARTA, KEPALA RUMAH TAHANAN KELAS II A YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK / TELECONFERENCE

- Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Rumah Tahanan Klas II Yogyakarta, Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Yogyakarta tanggal 1 April 2020
- Maksud dan tujuan kerjasama tersebut adalah : untuk tetap terselenggaranya persidangan perkara pidana dan dalam rangka mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu dengan persidangan secara elektronik / teleconference.
- Optimalisasi fungsi koordinasi antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Rumah Tahanan Klas II Yogyakarta, Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B
- Menciptakan sistem peradilan pidana terpadu dalam memanfaatkan teknologi.
- Mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang berlaku.



15. KESEPAKATAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TERDAKWA DAN TERPIDANA TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19

- ✓ Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 23 Juli 2020
- ✓ Maksud kerjasama tersebut adalah : melakukan sinergi dalam rangka pelayanan kesehatan dalam rangka mencegah penularan covid-19 kepada terdakwa dan

terpidana. Tujuan kerjasama ini adalah melakukan pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Yogyakarta.

- ✓ Rung lingkup : penataan mobilisasi terdakwa dan terpidana, penatalaksanaan pengamanan terdakwa dan terpidana, penyelenggaraan rapid diagnostic test (RDT), penyelenggaraan RT-PCR bagi terdakwa/terpidana reaktif, penyelenggaraan isolasi bagi terpidana / terdakwa positif.



PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA SEBAGAI PENGADILAN PENDIDIKAN

Pengadilan Pendidikan adalah pengadilan yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan masyarakat secara terpadu dalam bidang pendidikan semua disiplin ilmu, khususnya hukum / peradilan dan secara multiprofesi.

Latar belakang dibentuknya :

1. Kota Yogyakarta adalah kota pendidikan, sebagian besar penduduknya adalah pelajar dan mahasiswa
2. Banyaknya permohonan Informasi Akademis di Pengadilan Negeri Yogyakarta
3. Banyaknya praktik siding, dan magang di Pengadilan Negeri Yogyakarta



**Rapat Koordinasi Dengan Dekan-Dekan Universitas Untuk Meningkatkan Pelayanan,
Dalam Penyediaan Informasi Akademisi Dan Mendukung Pengadilan Negeri Yogyakarta
Sebagai Pengadilan Pendidikan**

INISIASI PENGADILAN PENDIDIKAN TAHUN 2020:

- PERMOHONAN INFORMASI AKADEMIS : 89 PERMOHONAN
- MAHASISWA MAGANG : 15 MAHASISWA
- PEMBICARA / NARASUMBER : 8 KEGIATAN DI BEBERAPA UNIVERSITAS
- PERADILAN SEMU : 48 KEGIATAN



16. PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN (UAD) TENTANG PROGRAM KULIAH LAPANGAN (FIELD STUDY) DAN PENELITIAN MAHASISWA PADA LAYANAN PENGASUHAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 14 Juli 2015.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang Psikologi yaitu Penyelenggaraan Program Kuliah Lapangan dan Penelitian Mahasiswa pada Layanan Pengasuhan Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan (UAD), khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Mata Kuliah Lapangan (*Field Study*).
- ✓ Para Pihak setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Program Kuliah Lapangan dan Penelitian Mahasiswa Pada Layanan Pengasuhan Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, khususnya pendampingan anak yang orangtuanya sedang beraktifitas ata berperkara (pengguna layanan) di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Mahasiswa melakukan praktik kuliah lapangan, penelitian atau melaksanakan pelayanan konsultasi dan pengasuhan anak pada layanan pengasuhan anak yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan kerjasama ini, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

17. KERJASAMA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN HUKUM DENGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- ✓ Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 27 September 2018.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang kemahiran hukum kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Mata Kuliah Pemagangan.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan Mata Kuliah Pemagangan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

18. PERJANJIAN KERJASAMA PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN TUGAS AKHIR (TA) BAGI MAHASISWA AKADEMI AKUNTANSI YKPN YOGYAKARTA DENGAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Akademi Akuntansi Ykpn Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 30 Oktober 2019.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang Ekonomi Akuntansi yaitu Penyelenggaraan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) (*Field Study*).
- ✓ Para Pihak setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Program Kerja Lapangan dan Penelitian Mahasiswa dan penyediaan informasi tentang praktik akuntansi tertentu atau informasi yang berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan perusahaan, yang menjadi peminatan bahan kajian mahasiswa dalam penulisan Tugas Akhir.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan kerjasama ini, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

19. KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA.

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 15 Oktober 2019.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Mata Kuliah Praktik Peradilan oleh mahasiswa termasuk didalamnya pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk kepentingan kerjasama tersebut.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan Mata Kuliah

Monitoring Persidangan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

20. KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TENTANG KERJASAMA KEGIATAN DI BIDANG PENDIDIKAN.

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 25 November 2019
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang Hukum yaitu Penyelenggaraan Program Kuliah Praktik Peradilan / Persidangan kepada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD).
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan kerjasama ini, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

21. PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN MONITORING PERSIDANGAN.

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 15 Oktober 2019.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang kemahiran hukum yaitu Monitoring Persidangan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Mata Kuliah Praktik Peradilan.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan Mata Kuliah Monitoring Persidangan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

22. PERJANJIAN KERJASAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA

- ✓ Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani tanggal 5 September 2019.
- ✓ Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang kemahiran hukum yaitu Pendidikan, penelitian dan Magang kepada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- ✓ Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak, secara bersama-sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan Mata Kuliah Monitoring Persidangan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak baik di tempat Pihak Kesatu maupun di tempat Pihak Kedua.

B. INOVASI PELAYANAN

1. MEMBUAT STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik yang memiliki 4 tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam

pelayanan publik. Lebih rinci lagi, Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban baik penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik. Setidaknya ada 12 kewajiban penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN hingga swasta maupun persorangan menyelenggarakan pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan.

Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi : 1) dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan; 2) persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif; 3) sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 4) jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 5) biaya/tarif, ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; 6) produk pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 7) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan; 8) kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman; 9) pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana; 10) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya; 11) jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja; 12) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 13) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan 14) evaluasi

kinerja pelaksanaan, penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan.

Saat ini Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempunyai standart pelayanan, namun sedang direview disesuaikan dengan pemenuhan 14 komponen tersebut dan disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada.



2. COWORKING SPACE DAN MEDIA CENTER PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Fasilitas ruang publik yang dapat dipergunakan untuk bekerja oleh mereka yang berkunjung ke pengadilan tersebut, dimana terdapat beberapa meja dan kursi layaknya di sebuah café. Fasilitas yang disediakan berupa stopkontak untuk mengisi daya listrik ke laptop maupun telepon genggam, free wifi. Di pojok kiri ruangan terdapat pajangan berbagai plakat yang diraih PN Yogyakarta terutama berkaitan dengan pencegahan korupsi dan gratifikasi. Sementara di sebelah kanannya terdapat kantin kejujuran / *honesty coffeeshop* dengan menu teh dan kopi lengkap dengan persediaan air panas,

sehingga yang ingin bekerja sambil menikmati minuman hangat tinggal membeli dan menyeduhnya langsung di tempat.

Perkembangan peradilan yang mengarah kepada sistem peradilan elektronik. Meski telah disediakan pojok *e-court* (*e-court corner*), para advokat masih mungkin untuk berfikir menyelesaikan pekerjaannya terkait *e-court* di pengadilan.

Ruangan tersebut akan menjadi fasilitas lain untuk mendukung terlaksananya sistem peradilan elektronik dengan lebih baik. Jika *e-court corner* dimaksudkan untuk melayani pengguna terdaftar dan pengguna lain yang baru mendaftar, fasilitas ini justeru untuk selama proses persidangan secara elektronik.

Ruangan Multifungsi

Ruangan tersebut bukan hanya untuk bekerja para mitra pengadilan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media center dan ruang pertemuan. Bilamana terdapat perkara-perkara yang menarik perhatian publik, bagian Humas Pengadilan akan mempersiapkan *press release* dan memberikan keterangan pers di ruangan tersebut. Hal tersebut akan terasa lebih baik ketimbang para awak media mendapatkan informasi di sembarang tempat atau dari sumber-sumber yang tidak jelas.

Dan jika ada mahasiswa yang melakukan penelitian atau membutuhkan penjelasan secara klasikal, ruangan tersebut dapat dimanfaatkan, karena Yogyakarta adalah kota pendidikan, banyak mahasiswa yang datang untuk observasi maupun penelitian. Mahasiswa atau peneliti dapat menggunakan fasilitas ini untuk mengerjakan tugas-tugasnya tanpa harus membuang-buang waktu ke tempat lain.

Infografis Co-working space



CO-WORKING SPACE



MEDIA CENTER UNTUK PERSS CONFERENCE

KAPAS-10 CO-WORKING SPACE

Workspace for the Modern Professional

MEDIA CENTER PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

ITU APA SIH??

KAPAS-10 CO-WORKING SPACE merupakan co-working space yang dimiliki Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dapat digunakan pengguna layanan profesional seperti Advokat / Penasehat Hukum, Aparat Kepolisian, Aparat Kejaksaan, Laps / Rutan, Bepas, Para Pihak dan Mahasiswa sehingga selama menunggu pelayanan masih dapat bekerja.

APA KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN KAPAS-10 CO-WORKING SPACE

- Menghadir: Seamless time
- Bebas menyelesaikan project atau pekerjaan di co-working space
- Networking dengan komunitas penasehat hukum atau pengguna layanan
- Upgrade skill
- Ngopi santiauyy...
- Free WiFi

SIRPA SAJA YANG BOLEH MENGGUNAKANYA?

Jika kamu adalah pengguna layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta, baik persidangan maupun PTSP, apa banget nih, kamu bisa memanfaatkan Kapas-10 co-working space itu!!

FASILITAS

- Co-working Space
- Meeting Room / sebagai tempat temu partners / klien maupun sharing knowledge
- Media center : publikasi program Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Free wifi
- Honey Coffee Shop

RULE / PERATURAN

- Jujur
- Sifat profesional / gadget
- Tanggung / berbicara depan
- Sopan
- Jaga kebersihan
- Bersahabat

www.pn-yogyakarta.go.id

1. PENGUATAN ANTI KORUPSI DAN ANTI SUAP DENGAN HIMBAUAN



2. PHOTOBOTH



Photoboth untuk masyarakat / pengguna layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah disediakan meskipun sederhana dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dan menampilkan pencapaian-pencapaian yang telah diraih Pengadilan Negeri Yogyakarta

beserta piagam / komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta

Photoboth dibuat dengan maksud agar mendekatkan pengadilan dengan masyarakat. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat orang bermasalah, “serem & ngeri” tetapi lebih “hommy”.

C. INOVASI SISTEM

Pembenahan dan Penyempurnaan Teknologi Informatika

1. ANTRIAN SIDANG dan ANTRIAN PTSP

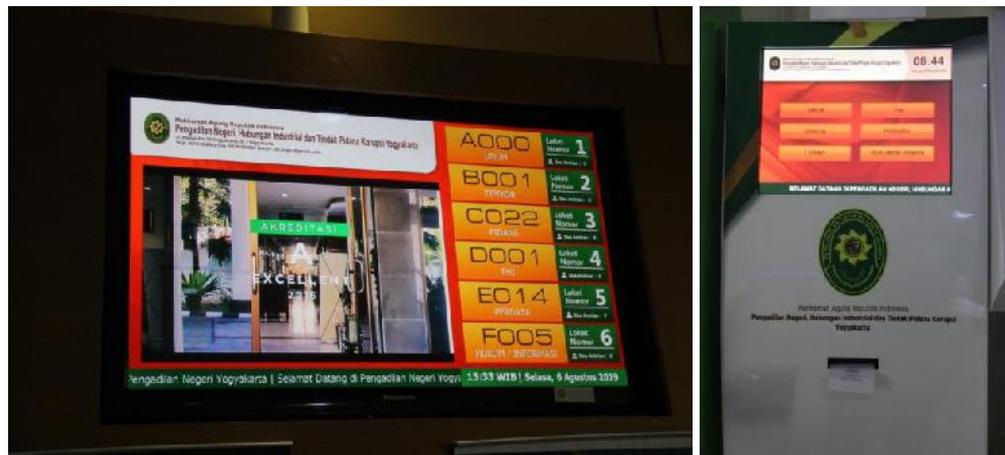


Antrian Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah layanan kepada Pencari Keadilan dimana Para Pihak yang berperkara akan dipanggil dan disebut nama pihak untuk memasuki ruang sidang dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi Absensi Pihak (Roll Sidang) di Meja Informasi dan Terkoneksi dengan data perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi ini berdasarkan kedatangan dan kelengkapan para pihak, yaitu dengan cara para pihak melaporkan kedatangan ke meja informasi. Para pihak yang sudah lengkap akan disidangkan terlebih dahulu, disamping itu masyarakat dapat mengetahui persidangan suatu perkara berkaitan dengan ruang sidang, status persidangan atau sudah selesai sidang.

Pemanggilan Pihak dapat dilakukan dengan menggunakan Personal Komputer, Laptop atau Handphone Android.

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan adanya peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta.



2. APLIKASI TRANSKRIP PERSIDANGAN

Aplikasi Transkrip Persidangan (ATP) adalah sebuah inovasi aplikasi peradilan yang dibuat untuk merubah proses administratif peradilan dari konvensional menjadi berbasis teknologi informasi.

Cara kerja ATP (Aplikasi Transkrip Persidangan) yaitu pengenalan suara pembicara dan dikonversi dalam bentuk text didalam komputer

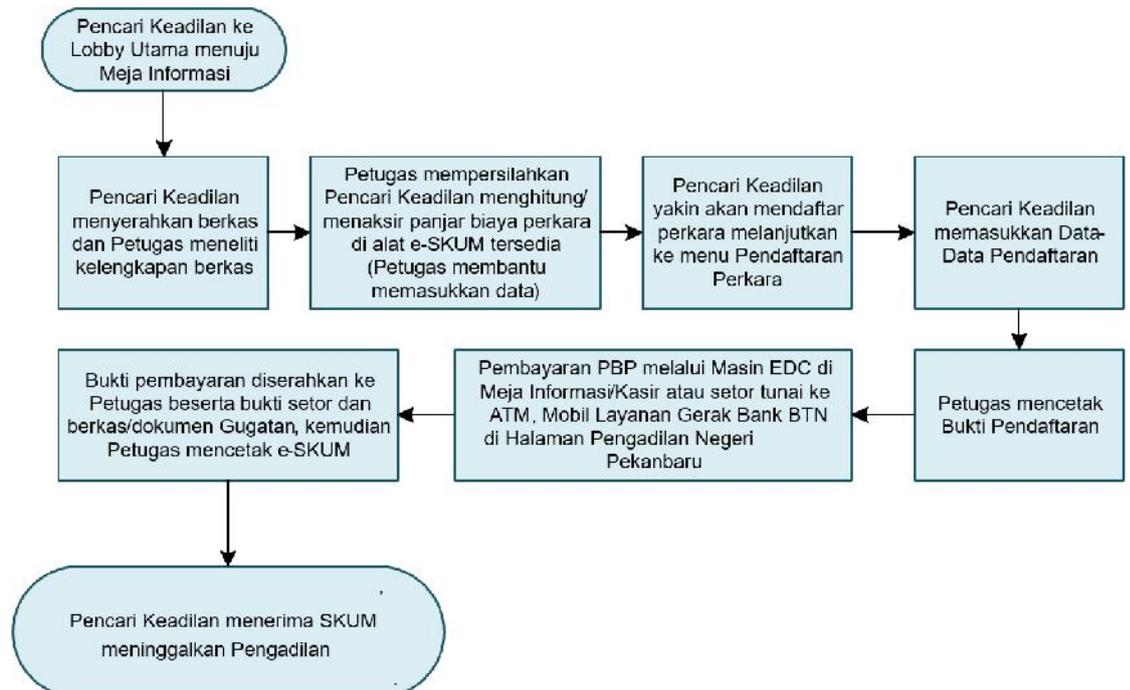
Terdiri dari beberapa panel yang ditampilkan, dan pembicara dalam ruang sidang dapat berbicara bersamaan sekaligus.



3. E-SKUM

e-SKUM adalah Sistem Aplikasi Menghitung Sendiri Panjar Biaya Perkara yang dilakukan oleh Para Pencari Keadilan di Lobby Utama dengan menggunakan alat e-SKUM.

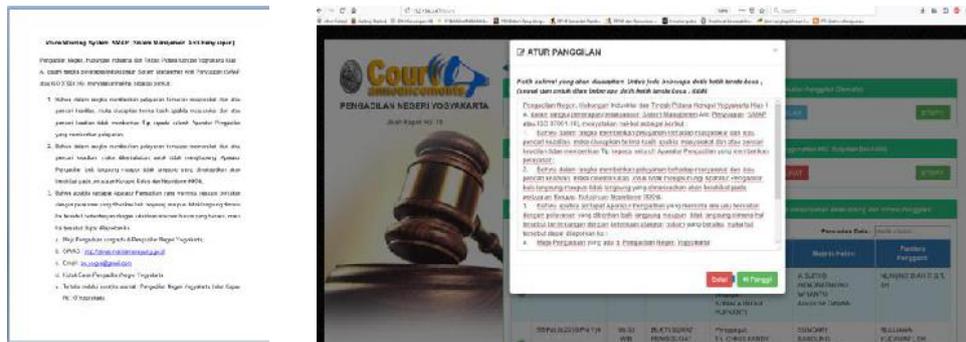
Maksud dan Tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKUM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.



4. E-COURT & ERATERANG CORNER

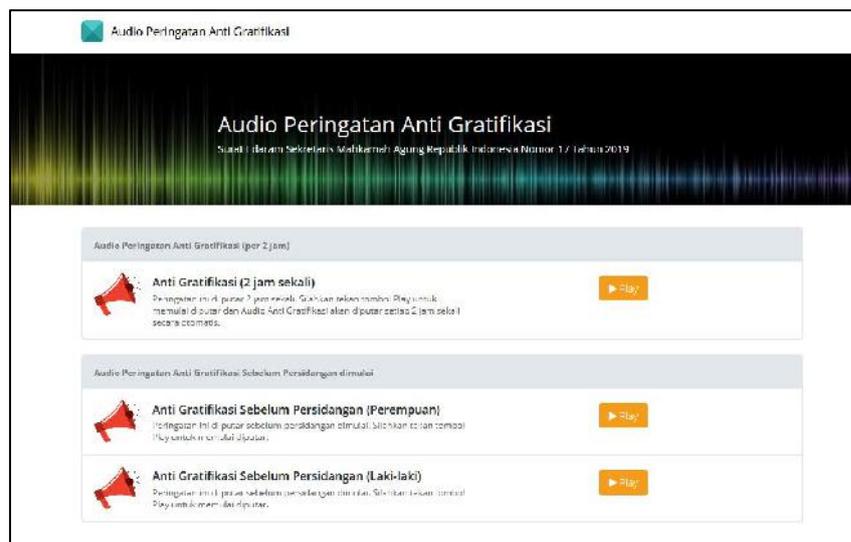


5. VOICE WARNING SYSTEM (SMAP)



Voice Warning System SMAP(Sistem Manajemen Anti Penyusapan) diumumkan 1 jam sekali secara rutin di hari kerja.

6. AUDIO GRATIFIKASI



Audio Peringatan Anti Gratifikasi diumumkan 2 jam sekali secara rutin di hari kerja.

7. JOGJA SMART SERVICE

Integrasi Aplikasi Layanan Pengadilan pada Aplikasi Jogja Smart Services (JSS), kerjasama dengan Diskominfo Kota Yogyakarta

Aplikasi JSS adalah jalur tambahan untuk menginformasikan dan memberikan pelaporan kejadian kedaruratan diluar jalur pelaporan konvensional (melalui telepon). Daftar layanan Pemerintah Kota yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dengan mengedepankan pelayanan mandiri (Swalayan) dengan Single Sign On (SSO)



8. MEDIA INFORMASI DIGITAL



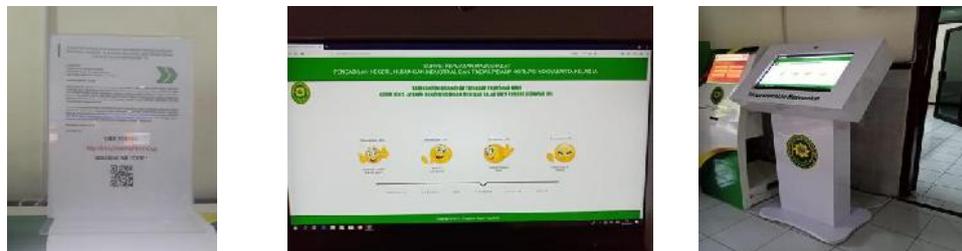
Informasi baik berupa prosedur layanan, standart pelayanan, persyaratan, video sosialisasi dan sebagainya disajikan dengan digital dan dapat diakses dengan QR Code baik pada lingkungan pengadilan maupun pada website.

9. WEBSITE AKSESIBLE BUAT PENYANDANG DISABILITAS

Situs Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

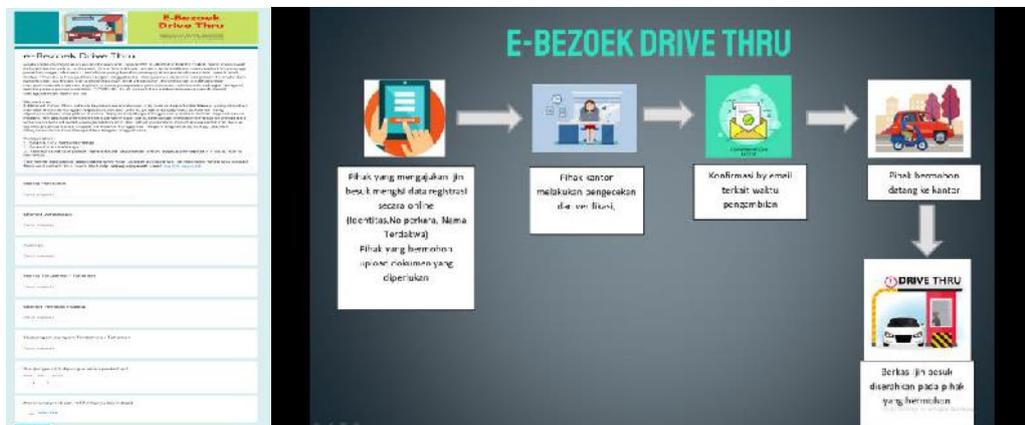


10. APLIKASI SURVEY IKM & IPK



Aplikasi survey IKM dan IPK

11. E-Bezoek Drive Thru



- ✓ Sebagai salah satu mitigasi resiko dalam menghadapi Pandemi COVID-19, pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta menerapkan E-Bezoek Drive Thru.
- ✓ E-Bezoek Drive Thru adalah layanan permohonan izin besuk kepada terdakwa, yang diajukan melalui website dengan registrasi secara online, pihak mengupload dokumen yang dipersyaratkan, dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam hal ini Kepaniteraan Pidana melakukan pengecekan dan verifikasi data, kemudian mengkonfirmasi by email dan whatsapp terkait waktu pengambilan izin dan pihak pemohon dapat mengambil izin besuk tersebut tanpa harus masuk ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta, cukup diambil dilayanan drive thru Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- ✓ Jika evaluasi layanan ini dianggap efektif, layanan ini akan ditingkatkan kepada layanan lain yang sifatnya one day service, misalnya surat keterangan, salinan putusan dsb.
- ✓ Kendala : Kebijakan mitra kerja dalam hal ini RUTAN dan LAPAS yang memiliki kebijakan lain untuk meniadakan besuk secara offline diganti dengan besuk secara online.

12. E-Permohonan informasi akademisi

e-Permohonan Informasi Akademisi dibuat untuk memfasilitasi masyarakat khususnya para akademisi yang hendak mengajukan permohonan informasi/ penelitian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan mekanisme pengisian formulir dan pelampiran

softcopy kartu identitas, softcopy surat pengantar dari universitas dan proposal. Fasilitas ini diharapkan mempermudah dan meringkas proses pengajuan permohonan informasi sebagai mitigasi resiko pencegahan pandemi COVID-19.

Mekanisme : e-Permohonan Informasi Akademisi adalah layanan permohonan informasi kepada akademisi, yang diajukan melalui website dengan registrasi secara online, pihak mengupload dokumen yang dipersyaratkan, dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta akan melakukan pengecekan dan verifikasi data, kemudian mengkonfirmasi by email dan whatsapp terkait waktu pengambilan informasi, apakah harus diambil ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta atau cukup melalui email.

Persyaratan :

1. Scan KTP / Kartu Identitas
2. Scan Surat Pengantar dari Universitas
3. Softcopy Proposal

13. E-Permohonan informasi PUBLIK

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL, DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

e-Permohonan Informasi Publik

Ande ingin mengajukan permohonan informasi???
e-Permohonan Informasi Publik hadir menjawab kebutuhan tersebut. e-Permohonan Informasi Publik dibuat untuk memfasilitasi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi/penelitian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan mekanisme pengisian formulir dan pelampiran softcopy kartu identitas, softcopy surat pengantar dari lembaga dan proposal. Fasilitas ini ini diharapkan mempermudah dan meringkas proses pengajuan permohonan informasi sebagai mitigasi resiko pencegahan pandemi COVID-19. Untuk syarat dan mekanismenya untuk dapat menggunakan fasilitas ini.

Mekanisme:
e-Permohonan Informasi Publik adalah layanan permohonan informasi kepada pengguna layanan, yang diajukan melalui website dengan registrasi secara online, pihak mengupload dokumen yang dipersyaratkan, dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta akan melakukan pengecekan dan verifikasi data, kemudian mengkonfirmasi by email dan whatsapp terkait waktu pengambilan informasi, apakah harus diambil ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta atau cukup melalui email.

Persyaratan:
1. Scan KTP / Kartu Identitas
2. Scan Surat Pengantar dari Lembaga
3. Softcopy Proposal

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Not pnjogja@gmail.com? [Switch account](#)

* Required

Form fields:
Nama Pemohon *
Jenis kelamin *
Nomor Whatsapp *
Alamat *
Nama Lembaga *
Mekasud dan Tujuan Pengajuan Informasi *
Informasi Dibutuhkan *
Persyaratan (Scan KTP / Kartu Identitas) *
Persyaratan (Surat Pengantar dari Lembaga) *
Persyaratan (Proposal) *

- ✓ e-Permohonan Informasi Publik hadir menjawab kebutuhan permohonan informasi. e-Permohonan Informasi Publik dibuat untuk memfasilitasi masyarakat

yang hendak mengajukan permohonan informasi/ penelitian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan mekanisme pengisian formulir dan pelampiran softcopy kartu identitas, softcopy surat pengantar dari lembaga dan proposal. Fasilitas ini diharapkan mempermudah dan meringkas proses pengajuan permohonan informasi sebagai mitigasi resiko pencegahan pandemi COVID-19.

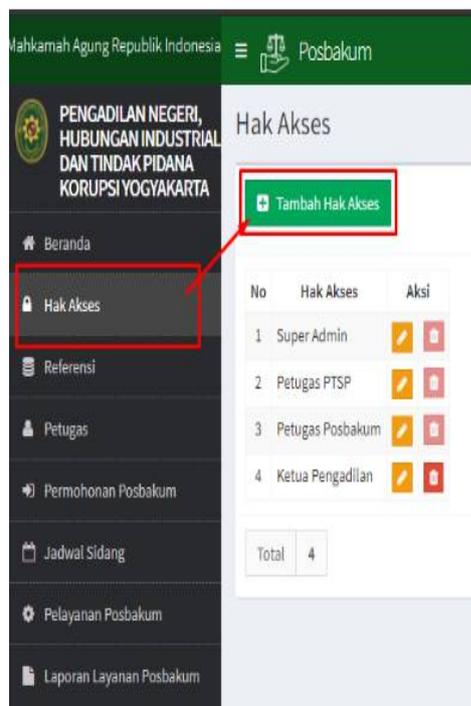
✓ Mekanisme :

e-Permohonan Informasi Publik adalah layanan permohonan informasi kepada pengguna layanan, yang diajukan melalui website dengan registrasi secara online, pihak mengupload dokumen yang dipersyaratkan, dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta akan melakukan pengecekan dan verifikasi data, kemudian mengkonfirmasi by email dan whatsapp terkait waktu pengambilan informasi, apakah harus diambil ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta atau cukup melalui email.

Persyaratan :

1. Scan KTP / Kartu Identitas
2. Scan Surat Pengantar dari Lembaga
3. Softcopy Proposal

14. E-Posbakum



E-Posbakum adalah aplikasi yang digunakan untuk adminitrasi layanan Posbakum yang selama ini masih dilaksanakan secara manual.

Administrasi ini ditujukan untuk memonitoring pelaksanaan posbakum, baik dari jenis layanan, advise yang diberikan maupun jumlah pengguna layanan.

Dengan e-Posbakum ini diharapkan Panmud Hukum, Panitera, Kasub PTIP, PPK, Sekretaris maupun Ketua Pengadilan dapat memonitoring pelaksanaan Posbakum.

Adapun manfaat dari aplikasi ini adalah :

1. Bagi Panmud Hukum dan Kasub PTIP : Memudahkan dalam pelaporan.
2. Bagi PPK : monev realisasi anggaran posbakum
3. Bagi Sekretaris : monev realisasi anggaran posbakum
4. Bagi Panitera : monev pelaksanaan bantuan hukum kepada pengguna layanan agar tepat sasaran
5. Bagi Ketua : monev pelaksanaan bantuan hukum dan realisasi anggaran agar tepat sasaran

BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA, sedangkan pada Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera untuk Kepaniteraan dan Sekretaris untuk Kesekretariatan.

Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang. Hakim Pengawas Bidang ini membuat laporan pengawasan setiap bulan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Untuk Pengawasan Keuangan sesuai dengan pedoman pengawasan telah dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan pemeriksaan atas laporan realisasi APBN dan Neraca.

Adapun selama Periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah dilakukan Pengawasan dan Pembinaan oleh Tim:

1. Pemeriksaan Reguler dari Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020
2. Audit Internal oleh Tim Audit Internal tanggal 3 Agustus 2020

B. EVALUASI

Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA telah berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh Pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab.

Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang telah berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan arahan –

arahan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kelas IA setiap satu bulan sekali.

Selain Pengawasan Internal, terdapat evaluasi dari eksternal antara lain:

1. Pembinaan dan Pendampingan Lomba PTSP dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 juni 2020
2. Evaluasi Penilaian PTSP oleh Tim Penilai dari Badan Peradilan Umum tanggal 7 Agustus 2020.
3. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Bawas MA RI tanggal 15 Oktober 2020
4. Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu oleh TAPM Badilum MA RI tanggal 16 Oktober 2020
5. Desk Evaluation Pelaksanaan Zona Integritas dari Kementerian PAN/RB dan MA RI tanggal 6 November 2020

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pelaksanaan keseluruhan program Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2020, maka dapat disimpulkan :

1. Secara umum seluruh program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat beberapa hambatan.
2. Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan baik antara pegawai, pejabat struktural, pejabat teknis belum optimal sehingga masih banyak kekurangan baik dalam pengelolaan sarana prasarana, anggaran, penyelesaian perkara maupun pelayanan publik.
3. Program-program yang sudah ada telah dipelihara dan ditingkatkan dengan pengembangan program-program yang baru yang mendukung peningkatan pelayanan publik.
4. Konsistensi pelaksanaan kegiatan maupun program-program berdasarkan perencanaan, juklak, juknis maupun peraturan yang ada sangat bergantung pada SDM dan Anggaran.
5. Komitmen pimpinan dan komunikasi internal sangat berpengaruh terhadap suksesnya suatu program.

B. REKOMENDASI :

Menghadapi pelaksanaan program Tahun 2021, dan berangkat dari pelaksanaan kegiatan Tahun 2020, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan setiap bidang perlu direview dan disesuaikan tupoksi sehingga tidak terjadi tumpang tindih penanganan program dan kegiatan.
2. Penunjukan personil/pegawai pada setiap kegiatan perlu memperhatikan tingkat kompetensi, dedikasi, tanggungjawab terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan.
3. Koordinasi perlu dilakukan lebih intensif antara seluruh komponen pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Dukungan sarana prasarana, anggaran dan peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis sangat perlu direncanakan dan direalisasikan.
5. Program-program yang telah berjalan agar ditingkatkan dan dipelihara.